

Laporan Hasil Penelitian

Pengembangan Sistem Pendidikan Berbasis Komunitas dan Kawasan (Studi Kesenjangan pada Kawasan Terpencil Desa Huku Kecil dan Desa Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat)



Tim Pengusul :

Dr. Alce Albartin Sapulette, M.Si.

NIP/ NIDN. 1975022005012003/ 2225037501

Benico Ritiauw, S.Sos, M.A

NIP. 199408272024211001

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

NOVEMBER 2024

LEMBARAN PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul "Pengembangan Sistem Pendidikan Berbasis Komunitas dan Kawasan (Studi Kesenjangan pada Kawasan Terpencil Desa Huku Kecil dan Desa Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat)" merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Alce A. Sapulette, M.Si dan Benico Ritiau, M.A, dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Panitia Program Bantuan Penelitian.

Ambon, November 2024

Peneliti



Dr. Alce A. Sapulette (Ketua)
NIP. 197503242005022003



Benico Ritiau, M.A (Anggota)
NIP. 199408272024211001

Mengetahui

Kepala Pusat,
Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)

Ketua Lembaga,
Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LP2M)



Dr. HJ Lesilolo, M.Pd

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Alce A. Sapulette, M.Si

Jabatan : Ketua peneliti

Unit kerja : IAKN Ambon

Alamat : Ambon

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Judul penelitian "**Pengembangan Sistem Pendidikan Berbasis Komunitas dan Kawasan (Studi Kesenjangan pada Kawasan Terpencil Desa Huku Kecil dan Desa Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat)**" merupakan karya orisinal saya;
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian program bantuan DBK selama tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, November 2024

Yang Menyatakan,



Dr. Alce A. Sapulette, M.Si
NIP.197503242005017003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wilayah yang luas dan heterogen, secara geografis maupun sosiokultural, memerlukan upaya yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan, di antaranya permasalahan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Permasalahan tersebut antara lain yang terkait dengan pendidik, seperti kekurangan jumlah guru (*shortage*), distribusi guru yang tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi guru di bawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*), dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*mismatched*), angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang. Sebagai bagian dari NKRI, daerah 3T memerlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, agar daerah 3T dengan pengembangan model pembelajaran daerah 3T dapat memajukan bersama sejajar dengan daerah lain. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengingat daerah 3T memiliki peran strategis dalam memperkokoh ketahanan nasional dan keutuhan NKRI.

Kesenjangan pendidikan selalu menjadi masalah mendasar dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Keterbatasan akses dan infrastruktur, ketersediaan sumber daya pendidikan, daya topang ekonomi keluarga, hingga budaya, menjadi sekian dari banyak alasan betapa rentannya instrumentasi pendidikan bagi masyarakat. Gambaran ini sekaligus mempertegas proposisi dasar bahwa pendidikan tidaklah given, melainkan bersifat konstitutif, dibentuk melalui ragam aspek eksternal seperti lingkungan, ekonomi, keluarga, hingga yang paling sublim semisal persahabatan.

Fakta kesenjangan ini telah lama disadari oleh Negara, sekaligus menjadi cikal bakal perumusan sejumlah kebijakan penanggulangan guna memastikan pemerataan pendidikan hingga ke pelosok desa. Pangkal inovasi kebijakan setidaknya tertuang dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024 yang memuat enam kriteria utama kategorisasi daerah tertinggal diantaranya perekonomian masyarakat, sarana-prasaran, dan karakteristik daerah. Ketentuan ini sekaligus menjadi dasar inovasi kebijakan pemerataan pembangunan lintas sektor, termasuk pendidikan. Semangat utamanya sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Semangat itu dioperasionalisasikan dalam misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam dokumen rencana strategis nasional 2020-2024 yakni; Pertama, mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Kedua, mewujudkan pelestarian dan kemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Ketiga, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Misi tersebut selanjutnya diperas menjadi empat tujuan strategis utama Kemendikbud yakni, perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter, pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan, dan yang terakhir penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Rumusan ini menjadi kompas bagi Kemendikbud dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional di bidang pendidikan. Salah satu yang paling banyak dipercahkan yakni upaya peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Kemendikbud menetapkan lima strategi utama guna menjamain ketercapaian arah kebijakan tersebut yakni peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan

pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah, dan peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.

Tentunya ketetapan ini dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di satu sisi, dan pemerataan layanan pendidikan di sisi yang lain, yang secara implementatif diupayakan secara simultan dalam banyak program semisal program Guru Penggerak, Aplikasi Ruang Guru, program Indonesia Mengajar, program Gerakan Literasi Sekolah (GLS), yang didesain dengan latar masalah yang sama yakni ketidaksetaraan kualitas sumber daya pendidikan (baik manusia maupun infrastruktur), dan keterbatasan daya jangkau pendidikan hingga ke kawasan 3T.

Beranjak dari situ, terbesit pertanyaan mendasar yakni seberapa luas dan berdampak misi, arah kebijakan dan program strategis pendidikan nasional, bagi komunitas masyarakat terpencil ? Pertanyaan ini dikondisikan sebagai pintu masuk menuju upaya untuk membongkar implementasi program pendidikan nasional, yang secara spesifik menjadi fakta yang dialami oleh komunitas di dua Desa terpencil yakni Huku Kecil dan Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Secara geografis, Kecamatan Elpaputih berjarak sekitar 135 Km dari ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat. Sementara Pusat pemerintahan Kecamatan berada di Desa Elpaputih. Kecamatan ini memiliki 7 desa, dua di antaranya yakni Desa Huku Kecil dan Abio. Kedua Desa ini terletak di kawasan pegunungan dengan kondisi keterisolasian yang cukup besar. Huku Kecil berpenduduk 2.107 jiwa, jumlah yang nyaris sama dengan Desa Abio. Rentang kendali perjalanan menuju ke dua Desa tersebut terbilang sangat rumit.

Akses jalan raya hanya terbatas hanya di Desa Sumeith. Sementara jarak tempuh dari Desa Sumeith ke Desa Huku Kecil yakni sejauh 32 km dan 40 km ke Desa Abio. Dari sisi ketersediaan infrastruktur pendidikan, Desa Abio memiliki jenjang pendidikan

Sekolah Dasar yang dikelola oleh Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK), sementara di Desa Huku Kecil terdapat dua jenjang pendidikan yakni SD YPPK dan SMP Negeri 3 Elpaputih. Untuk jenjang Pendidikan menengah dan tinggi, hanya tersedia di kawasan pusat Kecamatan, Kabupaten, maupun ibukota Provinsi. Kerumitan akses terhadap pendidikan tidak berhenti di situ. Ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik juga turut menjadi masalah mendasar. Sebagai contoh, di Desa Abio terdapat sedikitnya 3 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 7 orang tenaga honorer. Disebabkan kerumitan akses jalan dan jarak tempuh, para guru seringkali membutuhkan waktu paling lama seminggu untuk kembali melaksanakan tugas, bila sedang bepergian ke pusat Kecamatan maupun Kabupaten. Selama masa itu, kewajiban belajar mengajar diambil alih oleh tenaga honorer yang seluruhnya merupakan warga asli Desa dengan rata-rata tingkat pendidikan hanya lulusan SMA.

Kerumitan yang sama juga tampak melalui sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Kondisi sekolah yang tidak memadai serta minimnya bahan pustaka yang diharapkan dapat menjadi suplemen dalam membantu proses belajar mengajar, menjadi kendala dalam upaya transformasi pendidikan yang berdampak pada kualitas manusia. Mengapa situasi ini menjadi genting untuk dibahasakan ? Dibalik arah pembangunan pendidikan yang kini telah banyak mengandalkan teknologi, ternyata masih banyak daerah yang berjibaku, bernegosiasi dengan kerumitan, untuk sekedar mengakses fasilitas dasar pendidikan. Orientasi sistem pendidikan yang lebih mengutamakan input oriented dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan, serta tata kelolah pendidikan yang mengutamakan macro-oriented, yang dominan diatur oleh birokrasi di pusat, tampaknya memberi dampak pada realisasi yang tidak linear pada level mikro (Usman; 2014). Permasalahan infrastruktur, sarana-prasaran, kualifikasi tenaga kependidikan, berkelindan masif dalam lanskap pendidikan nasional, dengan kapasitas dampak yang besar terhadap kualitas peserta didik (Abduh, Basiru, Narayana, Safitri & Fauzi; 2022)

Kerumitan di atas tampaknya membutuhkan pola atau model alternatif dalam upaya untuk menata kelola pendidikan yang terjangkau dan adaptif pada kondisi sosial komunitas warga. Riset ini memikirkan tentang pentingnya pendekatan berbasis komunitas sebagai langkah prefentif, mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar

pendidikan dengan menempatkan jaringan sosial kewargaan sebagai basis utama penopang sistem pendidikan. Tradisi sistem kependidikan menyebutnya sebagai Sekolah alternatif. Sekolah alternatif tidak diartikan sebagai pengganti sekolah formal, melainkan mencari materi dan metode didaktik baru (Pradipto; 2007). Secara operasional, model jejaring sosial kewargaan ini diaktivasi melalui tiga jenis modalitas sosial yakni Bonding Social Capital, (hubungan kedekatan seperti keluarga atau hubungan antar etnik), Bridging Social Capital (hubungan yang lebih lebih bersifat instrumental seperti rekan bisnis, kenalan, teman dari berbagai kelompok etnis), dan Linking Social Capital (hubungan dengan kelompok formal institusi negara) (Foxton & Jones; 2011, Putnam; 1993).

Kerangka modalitas tersebut membentuk orientasi kolektif kewargaan yang berbasis pada nilai dan norma komunitas, sembari memperkuat ketahanan sosial (*social resilience*) masyarakat dalam menghadapi situasi krisis. Pada tataran ini, terdapat tiga aspek penting dalam memahami *social resilience* yakni *Coping Capacities*, *Adaptive Capacities* dan *Transformative Capacities*. *Coping Capacities* yang bersifat taktis dan berjangka pendek, diperlukan untuk mengatasi atau menyelesaikan dengan segera ancaman yang sedang berlangsung; dan di saat masyarakat tidak mengalami situasi krisis, *Adaptive Capacities* yang bersifat strategis dan berjangka Panjang, dibutuhkan untuk belajar dari pengalaman krisis dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan resiko di masa mendatang. Sedangkan *Transformative Capacities* atau *Participative Capacities* merupakan tahap tertinggi di mana masyarakat dapat menggerakkan kemampuannya untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan termasuk berelasi dengan berbagai institusi yang berkepentingan baik pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil guna mengatasi krisis atau potensi krisis yang sedang dan akan dialami (Keck & Sakdapolrak ;2013).

Pendayagunaan modal sosial dapat dilihat sebagai upaya untuk mereformasi sistem pendidikan yang selama ini terlalu menekankan karakteristik kebijakan yang *bersifat top-down* dan *direct rules*, tanpa mengantisipasi kemungkinan kepelbagaian kondisi sosial masyarakat dengan corak lokalitas yang spesifik. Pendekatan ini memberi akses bagi masyarakat dan atau komunitas, untuk terlibat aktif dalam giat pembangunan, termasuk

pendidikan. Dengan kata lain, masyarakat tidak diletakan sebagai objek melainkan subjek kebijakan. Tata nilai, norma, kekerabatan, dan pola relasi sosial, berlaku sebagai support system guna mendukung program-program strategis pendidikan.

Dalam kasus masyarakat Desa Huku Kecil dan Abio, terdapat tugas besar yakni memicu kesadaran komunitas warga dalam memandang keterbatasan dan kesenjangan pendidikan sebagai bagian dari krisis. Pendekatan di atas dilihat cukup kapabel digunakan dengan mempertimbangkan aspek kontekstualitas. Kontekstualitas menjadi masalah serius, tidak hanya dalam lanskap kebijakan pemerataan pendidikan, tetapi juga secara lebih teknis ditemukan dalam kurikulum pembelajaran. Kondisi sosial masyarakat terpencil, dengan karakteristik sosial-budaya yang spesifik, sebagaimana di Desa Huku Kecil dan Abio, menjadi prakondisi pentingnya kontekstualitas dalam pendidikan. Hal ini dilakukan agar tradisi pembelajaran jauh lebih adaptif dan aplikatif (Nurchamid; 2021).

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini yakni;

1. Bagaimana jejaring sosial kewargaan terbentuk, diaktivasi dan diterapkan sebagai penopang implementasi sistem pendidikan di Desa Huku Kecil dan Abio ?
2. Bagaimana coping, adaptive, dan transformative masyarakat desa dalam rangka membangun sistem pendidikan komunitas yang berdampak pada transformasi sumber daya manusia ?
3. Bagaimana model pengembangan sistem pendidikan berbasis komunitas dan kawasan di Desa Huku Kecil dan Abio ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini yakni untuk memahami, menjelaskan, dan merumuskan:

1. Menganalisis pendayagunaan jejaring sosial kewargaan yang terbentuk, diaktivasi dan diterapkan sebagai penopang sistem pendidikan komunitas warga di Desa Huku Kecil dan Abio.

2. Mengkaji coping, adaptive, dan transformative masyarakat desa dalam rangka membangun sistem pendidikan komunitas yang berdampak pada transformasi sumber daya manusia
3. Merumuskan model pengembangan sistem pendidikan berbasis komunitas dan kawasan di Desa Huku Kecil dan Abio guna menemukan pola alternatif yang kapabel dikerjakan dalam mengkerangkai sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif, berbasis komunitas dan kawasan

D. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan untuk melihat pola atau model sistem pendidikan pada kawasan terpencil, sudah pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa hasil riset terdahulu yakni sebagai berikut; *Pertama*, riset yang dilakukan oleh Imam Fitri Rahmadi pada 2020 dengan tema “Pendidikan Di Daerah Kepulauan Terpencil: Potret Siswa, Guru, Dan Sumber Belajar” penelitian ini kemudian melihat Pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia terkenal dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi siswa, guru, dan sumber belajar pada sekolah di daerah kepulauan Pongok dan Celagen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sangat sedikit lulusan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pongok dan Celagen yang melanjutkan ke perguruan tinggi, masih terdapat cukup banyak guru yang berlatar belakang pendidikan strata 1 non-kependidikan, dan hampir tidak ada koleksi buku panduan pendidik di perpustakaan sekolah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Abduh pada 2022 tentang Potret Pendidikan di Daerah Terpencil Kampung Manceri Cigudeg Kabupaten Bogor” penelitian melihat Pendidikan di daerah terpencil dihadapkan dengan berbagai masalah yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat terpencil di kampung Manceri, Cigudeg Bogor memandang pentingnya pendidikan dan untuk mengetahui factorfaktor apa yang mempengaruhi rendahnya pendidikan di terpencil di Kampung Manceri, Cigudeg Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling, dengan pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Pandangan masyarakat di Kampung Manceri Cigudeg Bogor terkait pentingnya pendidikan masih sangat rendah, hal ini dibuktikan masih terdapat anak putus sekolah. (2) Yang menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Kampung Manceri, Cigudeg Bogor adalah: rendahnya kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya pendidikan, karena factor ekonomi, lingkungan dan jarak menuju kesekolah

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi Nur Fadillah pada 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Terpencil (Studi Kasus pada SD Inpres Ampiri Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru). Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data Melakukan observasi umum Menentukan fokus dan subjek/informan penelitian Melakukan observasi partisipasi pada siswa dan orang tua siswa Melakukan pengamatan terhadap aktifitas siswa di sekolah dan di lingkungan keluarga siswa Melakukan analisis deskripsi dan pengecekan keabsahan data Melakukan wawancara mendalam yaitu berupa dialog dengan siswa, orang tua siswa, masyarakat sekitar lingkungan siswa dan guru SD Inpres Ampiri. Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan hasil Pandangan masyarakat Dusun Ampiri Desa Bacu-bacu terhadap pendidikan belum sepenuhnya baik, itu terlihat dari tingkat kepeduliannya terhadap pendidikan anak yang masih kurang. Masih banyaknya terdapat anak-anak yang tidak menempuh pendidikan. Pola pikir masyarakat di Dusun Ampiri Desa Bacu-bacu yang menjadikan pendidikan bukan sebagai prioritas, masyarakat Dusun Ampiri Desa Bacu- bacu yang lebih menjadikan bekerja untuk menghasilkan uang adalah yang paling penting. Faktor penyebab rendahnya motivasi siswa untuk bersekolah adalah faktor lingkungan, ekonomi, dan jarak antara rumah ke sekolah, sedangkan faktor pendukung adalah guru dan partisipasi pemerintah

Keempat, Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal merupakan daerah yang paling terluar pada wilayah Indonesia, pada dasarnya ada 122 wilayah di Indonesia yang masuk dalam wilayah 3T salah satunya adalah Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur. Dalam daerah studi Ibu Kota Kabupaten Mahakam Hulu yaitu Ujoh Bilang,

permasalahan yang terjadi ialah sangat jauh kepedalaman hutan Kalimantan dan cukup terisolir hanya dapat melalui jalur sungai karena belum ada jalur darat yang layak. Sistem pendidikan yang rata-rata masih minim, infrastruktur sekedarnya, minimnya jumlah tenaga pendidik yang memadai dan juga kualitas guru yang masih rata-rata lulusan sekolah menengah keatas atau sederajat, sehingga untuk tenaga terdidik khususnya sarjana pendidikan masih sangat minim.

Penelitian ini menggunakan metodologi Research and Development (R&D). Dalam Objek penelitian ini ialah pembentukan dan penerapan Forum Komunitas Guru (FKG 3T) terhadap pengajaran pada beberapa sekolah dalam studi penelitian. Selama penelitian berlangsung metode pembelajaran yang dilaksanakan berdeda pada tiap masing-masing sekolah seperti SDN 001 Ujoh Bilang metode normative, SMPN 001 Ujoh Bilang metode deskriptif dan SMUN 001 Ujoh Bilang metode hermeneutis. Hasil yang diperoleh ialah meningkatnya kualitas pendidikan dalam waktu ke waktu khususnya dalam pencapaian nilai cukup baik pada beberapa mata pelajaran di sekolah dan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kesulitan dalam jumlah tenaga pendidikan berkualitas yang berada pada daerah 3T.

Kempat penelitian terdahulu diatas menunjukan perbedaan dalam melihat persoalan pendidikan dengan menggunakan variable, metode, hingga konklusi yang menekankan peran penting pemerintah sebagai aktor utama dalam penanganan pendidikan di kawasan terpencil. Berbeda dengan itu, riset ini hendak menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani permasalahan mendasar dalam sistem pendidikan yang dialami oleh komunitas warga di kawasan terpencil. Keterbatasan akses dan jangkauan, serta keterisolasian, menjadi prakondisi bagi pentingnya memikirkan kembali daya partisipasi komunitas dalam mendukung ragam program pendidikan. Komunitas dilibatkan sebagai subjek penting dalam setiap upaya dan giat pengembangan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan kontekstual, dengan mengandalkan kekuatan kewargaan berbasis komunitas dan kawasan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

Teachers working with students need increased awareness that different cultures interpret important concepts differently (Archie; 2008). Argumen ini setidaknya melatari semangat untuk memformulasikan pendidikan yang kontekstual dan tidak berjarak dengan karakteristik sosio-kultural dan kewilayahan masyarakat. Mangungwijaya dalam Tilaar (2004) menyatakan bahwa proses pendidikan memiliki dua aspek yang saling mengisi, yaitu sebagai proses hominisasi dan proses humanisasi. Pendidikan harus memiliki paradigma baru yang dapat menyajikan model dan strategi pembelajaran sehingga diharapkan dapat menyeimbangkan proses hominisasi dan humanisasi. Proses hominisasi melihat manusia sebagai makhluk hidup dalam konteks lingkungan ekologi yang memerlukan terasahnya kemampuan intelektual untuk menghadapi tantangan globalisasi. Proses humanisasi menekankan manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai otonomi moral dan sensitivitas (kedaulatan budaya).

- a. Hominisasi Pendidikan melihat manusia sebagai makhluk hidup di dalam dunia dan ekologi. Proses hominisasi tersebut manusia memerlukan kebutuhan biologis seperti makan, beranak pinak, memerlukan pemukiman, dan pekerjaan untuk menopang kehidupan. Proses hominisasi memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis. Pendidikan harus mampu menghasilkan output kompetitif yang mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dalam menopang kehidupannya yang lebih baik secara ekonomis dan sosial. Pendidikan harus memiliki orientasi intelektual yang dibutuhkan manusia untuk bersaing secara kompetitif sehingga mereka dapat diterima pasar, terlebih dalam era global yang lebih berasaskan knowledge based economy.
- b. Humanisasi Pendidikan melihat manusia sebagai makhluk yang bermoral (human being). Makhluk yang bermoral berarti bahwa manusia bukan hanya sekedar hidup tetapi hidup untuk mewujudkan eksistensi, yaitu bahwa manusia hidup bersama-sama dengan sesama manusia sebagai ciptaan Yang Maha Kuasa. Proses

humanisasi tingkah laku manusia diarahkan kepada nilai-nilai kehidupan yang vertikal di dalam kenyataan hidup bersama dengan manusia lain. Nilai-nilai luhur tersebut, apakah diwahyukan ataupun yang dipelihara di dalam kehidupan bersama manusia karena disepakati, dapat mengikat kehidupan bersama menuju suatu cita-cita bersama, yaitu kehidupan yang lebih baik, lebih tenteram, dan berkeadilan. Hal-hal tersebut dijalin dan terjalin di dalam nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat atau suatu kelompok hidup bersama manusia. Proses humanisasi mencapai puncaknya pada seseorang yang berpendidikan dan berbudaya (*educated and civilized human being*)

Pelembagaan pendidikan tidak lain, harus dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari pelembagaan sosial. Bahkan, dapat dilihat sebagai bagian dari sistem sosial. Sekolah sebagai sistem sosial adalah suatu upaya untuk memahami tujuan, peran, hubungan dan perilaku berbagai komponen pendidikan di sekolah dalam setting sosial. Setidak-tidaknya ada dua elemen dasar yaitu: Pertama, institusi, peran dan harapan dalam menentukan norma bersama atau dimensi sosial. Kedua, individual, personalitas dan pemenuhan kebutuhan yang merupakan dimensi psikologis. Di sini sekolah sebagai sistem sosial diharapkan mampu mencapai moral kerja anggota organisasi yang efektif, efisien dan memuaskan melalui integrasi kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Bagian penting dari postulat ini yakni masyarakat diletakkan sebagai bagian integral dari pendidikan, sebagai subjek yang berperan penting dalam menopang agenda dan program pendidikan. Pada dasarnya masyarakat (*society*) dan komunitas (*community*) memiliki mekanisme katup pengaman yang menjamin relasi-relasi sosial baik di dalam komunitas maupun hubungan antar komunitas. Dengan kata lain, institusi katup pengaman yang mengandung nilai-nilai perekat sosial (*social glue*) lazim berada di dalam tatanan masyarakat (*komunitas*) maupun sebagai basis relasi sosial antar komunitas.

Dalam perspektif yang lain, kekuatan ini dikenal pula sebagai modal sosial (*social capital*) yang diyakini tertambat di dalam struktur sosial, yang untuk memanfaatkannya, harus diakses atau dimobilisasi dengan tindakan yang disengajakan, seperti yang dikatakan oleh Nan Lin (dalam Callois and Angeon, 2004:3), bahwa; *social capital as resources embedded in a social structure which are accessed/mobilized in purposive*

actions. Cukup banyak ahli telah mendefinisikan konsep modal sosial; satu di antaranya yang dipandang relevan digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh Lang dan Hornburg (1998), yang mengartikan modal sosial; commonly refers to the stocks of social trust, norms, and networks that people can draw upon in order to solve common problems. Trust (disebut juga social trust atau generalised trust) atau saling percaya, mengacu pada tingkat keyakinan bahwa orang lain akan bertindak sebagaimana yang dikatakan, atau yang diharapkan untuk bertindak, atau apa yang dikatakan dapat dipercaya. Fukuyama (1995), menyebutkan dua indikasi penting dari trust yaitu kewajiban (obligation) dan harapan (expectation). Dalam pandangannya, rasa saling percaya akan tumbuh dan berkembang jika terjadi pertukaran yang seseorang dapat menjadi bagian lebih dari satu jejaring (Commission Research paper; 2003).

Ketiga indikator penting dari modal sosial yang disebutkan di atas, mempunyai kaitan yang erat satu dengan lainnya. Dalam konteks ini, jejaring merupakan wadah penting untuk menampung interaksi sosial dalam kalangan mereka yang terlibat di dalamnya. Interaksi sosial yang berlangsung intensif dan berkesinambungan, pada gilirannya akan menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama mereka yang berada di dalam dinamika tersebut. Sementara norma-norma yang berada di luar merepresentasi pedoman tentang bagaimana seseorang harus berperilaku atau menyatakan kepercayaannya dapat diterima dalam suatu konteks tertentu. Inilah yang oleh Grief (1994), diidentifikasi sebagai rational cultural belief yang mengandung harapan-harapan dari seorang individu sehubungan dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan orang lain dalam berbagai situasi. Pentingnya norma dalam situasi tersebut, diilustrasikan oleh Hechter dan Opp (2001), dengan menjelaskan; *without norms it is hard to imagine how interaction and exchange between strangers could take place*.

Apa yang dijelaskan ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari premis penting dibalik gagasan modal sosial yaitu investment in social relations with expected returns (Lin, Cook, and Burt (eds); 2001). Interaksi yang intensif dan berkesinambungan yang berlangsung di dalam suatu jejaring, memfasilitasi terbentuknya pertalian warga (civic engagement), yang dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu (1) associational forms of civic engagement, yang bersifat ikatan formal seperti asosiasi bisnis, organisasi profesi,

kelompok-kelompok olahraga, serikat pekerja, dan lain-lain; dan (2) everyday forms of civic engagement, yang bersifat ikatan informal dan dapat dilihat dalam bentuk interaksi rutin komunitas warga.

Dalam berbagai literatur tentang modal sosial, umumnya dikenal 3 (tiga) tipe modal sosial yaitu *bonding social capital*, *bridging social capital*, dan *linking social capital*. Bonding social capital mengacu pada relasi-relasi di antara kelompok-kelompok yang relatif homogen (seperti suku, keagamaan, atau kelompok-kelompok sosio-ekonomi), dan ia memperkuat ikatan-ikatan sosial dalam kelompok yang bersangkutan. Sedangkan *bridging social capital* merujuk pada relasi-relasi antar kelompok yang heterogeny, dan memperkuat ikatan-ikatan lintas kelompok tersebut. Sementara yang ketiga adalah *linking social capital* yang memperlihatkan relasi antar individu-individu dan kelompok-kelompok dalam strata sosial yang berbeda dalam suatu hierarki di mana kekuasaan, status sosial dan kekayaan dinilai oleh kelompok-kelompok yang berbeda (Commission Research Paper; 2003).

Kerangka modalitas tersebut membentuk orientasi kolektif kewargaan yang berbasis pada nilai dan norma komunitas, sembari memperkuat ketahanan sosial (social resilience) masyarakat dalam menghadapi situasi krisis. Pada tataran ini, terdapat tiga aspek penting dalam memahami social resilience yakni *Coping Capacities*, *Adaptive Capacities* dan *Transformative Capacities*. Mengutip Keck dan Sakdapolrak (2013), Coping, Adaptive, dan Transformative Capacities dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Coping capacities address “re-active” (ex-post) and “absorptive” measures of how people cope with and overcome immediate threats by the means of those resources that are directly available. The rationale behind coping is the restoration of the present level of well-being directly after a critical event.*
- b. *Adaptive capacities refer to the “pro-active” (ex-ante) or “preventive” measures that people employ to learn from past experiences, anticipate future risks and adjust their livelihoods accordingly. Adaptation is geared toward incremental change, and serves to secure the present status of people’s well-being in the face of future risks. The major difference between coping and adaptation is grounded in the temporal scope*

of the activities involved. While coping addresses tactical agency and short-term rationale, adaptation involves strategic agency and more long-term planning.

- c. *Finally, transformative capacities, or “participative capacities”, encompass people’s ability to access assets and assistance from the wider socio-political arena (i.e. from governmental organizations and so-called civil society), to participate in decisionmaking processes, and to craft institutions that both improve their individual welfare and foster societal robustness toward future crises. The main difference between transformation and adaptation refers to the degree of change and the outcome it implies. Transformation is geared towards a radical shift in which the objective is not to secure, but to enhance people’s well-being in the face of present and/or future risks. As such it explicitly incorporates topics of progressive change and development*

Coping Capacities yang bersifat taktis dan berjangka pendek, diperlukan untuk mengatasi atau menyelesaikan dengan segera ancaman yang sedang berlangsung; dan di saat masyarakat tidak mengalami situasi krisis, *Adaptive Capacities* yang bersifat strategis dan berjangka Panjang, dibutuhkan untuk belajar dari pengalaman krisis dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan resiko di masa mendatang. Sedangkan *Transformative Capacities* atau *Participative Capacities* merupakan tahap tertinggi di mana masyarakat dapat menggerakkan kemampuannya untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan termasuk berelasi dengan berbagai institusi yang berkepentingan baik pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil guna mengatasi krisis atau potensi krisis yang sedang dan akan dialami (Keck & Sakdapolrak ;2013)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dipilih secara sengaja karena mempertimbangkan karakter dari substansi masalah yang akan diteliti, di mana jawaban berupa hasil penelitian perlu digali melalui data secara mendalam. Dengan demikian harapannya adalah melalui pendekatan ini, bisa diperoleh pengetahuan, pemahaman dan penjelasan yang mendalam tentang kasus yang hendak diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di dua Desa terpencil yakni Desa Huku Kecil dan Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat.

B. Informan Kunci Penelitian

Dalam rangka mengakses data yang relevan, valid dan reliable, maka penelitian ini akan menentukan informan kunci secara purposive sesuai konteks penelitian. Tujuannya agar data yang diperoleh adalah data yang berasal dari narasumber yang berkompeten. Atas dasar pertimbangan ini, maka informan kunci dalam penelitian ini yakni:

Tabel 1. Informan Kunci Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	2
2	Tokoh Agama	2
3	Tokoh Adat	2
4	Tokoh Masyarakat dan Pemuda	4
5	Tenaga Pendidik/Guru	4
6	Voluntir Pengajar kawasan terpencil	2
7	Kepala Dinas Pendidikan SBB	1
8	Masyarakat	20
	Total	47

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), dan observasi non partisipan. Wawancara mendalam dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara (*guide questionnaire*) yang sudah dipersiapkan sebelumnya; sementara observasi dilakukan terhadap beberapa situasi sosial sesuai yang direncanakan di dalam pedoman observasi (*guide observation*).

Wawancara mendalam yang dilakukan terhadap para informan kunci, akan didahului dengan koordinasi yang dimaksudkan untuk meminta kesediaan waktu para informan kunci agar berkenaan diwawancarai. Untuk mendukung kelancaran wawancara tersebut, Peneliti akan dibekali dengan alat perekam dan alat tulis untuk menampung semua data yang diberikan.

Berkenaan dengan proses pengumpulan data lapangan, akan dilakukan pula validasi data dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu (Moleong 2005:178). Dari empat macam metode triangulasi yang dikemukakan oleh Denzin (1978) , proses menguji keabsahan data di dalam penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber di mana Peneliti akan membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu data melalui waktu dan informan kunci yang berbeda. Demikian halnya dengan triangulasi penyidik di mana Peneliti akan memanfaatkan pengetahuan atau pandangan para ahli lainnya untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini pun akan diuji dengan triangulasi dokumen untuk memastikan validitas dan reabilitas data yang diperoleh dibandingkan dengan data hasil penelitian sebelumnya pada lokasi yang sama.

D. Analisis Data

Data kualitatif yang dikoleksi dari lapangan baik melalui wawancara mendalam maupun observasi, akan dilakukan melalui 3 (tiga) alur kegiatan. Miles dan Huberman (2007:16-17), menyebutkan bahwa proses analisis data kualitatif berlangsung melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Menggunakan reduksi data supaya data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara yaitu, melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, kemudian menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berdasarkan pada penyajian-penyajian data maka Peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh, menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Menurut Miles dan Huberman, penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Sedangkan tentang penarikan kesimpulan, menurut mereka, hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Semua makna yang muncul dari data yang diperoleh, perlu mendapatkan pengujian guna memastikan validitas dan reabilitas data dimaksud.

E. Skema Jalannya Penelitian

Tahap 1 Tahun 2024

1. Mengkaji hasil penelitian sebelumnya untuk melakukan pemetaan dan mendapatkan model penelitian
2. Penyusunan Proposal Penelitian dan dokumen pendukung
3. Pendekatan Lapangan pada lokasi penelitian
4. Mengadakan penelitian di Desa Huku Kecil dan Abio, Kecamatan Elpaputih.
5. XMempersiapkan jadwal keberangkatan dan transportasi

Tahap II Tahun 2024

1. Pemetaan sosial untuk mendapatkan Kondisi objektif masyarakat
2. Pengumpulan Data Sekunder terkait dengan gambaran geografis, demografis dan infrastruktur yang ada.
3. Wawancara dengan informan penelitian
4. Triangulasi data untuk mendapatkan keabsahan data

Tahap III Tahun 2024

1. Pengumpulan Data dan Reduksi Data lapangan berupa catatan hasil wawancara, pengamatan, gambar dan dokumen lainnya.
2. Reduksi dan penyederhanaan data serta penggolongan data.
3. Pembahasan serta analisis data, interpretasi data penyajian.
4. Penarikan kesimpulan dan rekomendasi
5. Penyerahan Laporan

Tahap IV Tahun 2025-2026

Hasil riset akan diformulasikan ke dalam dokumen usulan kebijakan, advokasi dan karya ilmiah berbentuk Jurnal Nasional dan atau Internasional, dengan fokus

mengelaborasi aspek pengembangan Pendidikan kawasan terpencil, sebagaimana yang akan ditemukan dalam kerja penelitian di Desa Huku Kecil dan Abio, Kecamatan Elpaputih

F. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tabel 2. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun 2024					
Aktivitas	Bulan				
	Jun	Jul	Agu	Spt	Okt
Aktivitas 1. Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian					
Aktivitas 2. Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian.					
Aktivitas 3. Coaching pengumpulan data penelitian.					
Aktivitas 4. Pelaksanaan Penelitian					
Aktivitas 5. Input dan pengolahan & data					
Aktivitas 6. Mendiskusikan Model Pengembangan Pendidikan di Daerah Terpencil					
Aktivitas 7. Presentasi hasil luaran bantuan					
Aktivitas 8. Publikasi penelitian					
Aktivitas 9. Penyusunan draft laporan					
Aktivitas 10. Penyerahan laporan akhir					

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Seram Bagian Barat sebagian besar wilayahnya terletak di Pulau Seram. Kabupaten ini berdiri sejak tahun 2003, terbentuk dari pemekaran Kabupaten Maluku Tengah, secara geografis terletak antara: 1o 19' – 7o 16' Lintang Selatan dan 127o 20' – 129o 1' Bujur Timur. Kabupaten Seram Bagian Barat dibatasi oleh Laut Seram di sebelah utara, Laut Banda di sebelah selatan, Laut Buru di sebelah barat, dan Kabupaten Maluku Tengah di sebelah timur. Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan kabupaten bahari dengan jumlah pulau sebanyak 52 pulau dan luas arealnya mencapai 5,017.14 kilometer persegi. Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri memiliki 11 kecamatan dan 92 desa. Jarak antara ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan:

1. Piru - Waesala : 41 km
2. Piru - Masawoi : 111 km
3. Piru - Piru : 3 km
4. Piru - Luhu : 53 km
5. Piru - Kairatu : 52 km
6. Piru - Kamal : 30.6 km
7. Piru - Honitetu : 76 km
8. Piru - Latu : 100 km
9. **Piru - Elpaputih : 135 km**
10. Piru - Taniwel : 76 km
11. Piru - Taniwel Timur : 105,2 km.

Iklm di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah iklim laut tropis dan iklim musim, karena letak wilayah Seram Bagian Barat di dekat daerah khatulistiwa dan dikelilingi oleh laut luas. Oleh karena itu iklim di sini sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan iklim musim, yaitu musim Barat atau Utara dan musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim selalu diselingi oleh musim Pancaroba. Musim Pancaroba merupakan transisi dari kedua musim tersebut. Suhu tertinggi di kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 tercatat sebesar 34,8°C di bulan Desember, untuk suhu terendah tercatat sebesar 18°C di bulan Agustus 2023. Di tahun 2023, curah hujan tertinggi ada di bulan Juli yaitu sebesar 314 mm dan curah hujan terendah ada di bulan Desember sebesar 63,4 mm.

Jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu sebesar 214.979 jiwa pada tahun 2023. Dimana jumlah penduduk terbesar ada di kecamatan Huamual sebesar 22%. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2022-2023 adalah 69,78% dimana laju pertumbuhan penduduk terbesar ada di kecamatan Kepulauan Manipa yaitu sebesar 69,78%. Rasio jenis kelamin Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 101,97 yang artinya terdapat 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Data untuk pendidikan yang dicakup adalah data semester ganjil. Untuk tahun ajaran 2023/2024, jumlah murid Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) sebanyak 3.134 dan 423 dengan masing-masing jumlah guru yaitu 250 dan 73. Untuk tahun ajaran yang sama Jumlah murid Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 24.045 dan 2.946 dengan masing-masing jumlah guru yaitu 2.228 dan 374. Jumlah murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 10.485 dan 2.021 dengan masing-masing jumlah guru yaitu 1.429 dan 458. Jumlah murid Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) berturut-turut sebanyak 8.423, 1.352 dan 1.409 dengan masing-masing jumlah guru yaitu 856, 325, dan 277.

Kesehatan Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Rumah Sakit Umum sebanyak satu unit, Puskesmas Rawat Inap 6 unit dan Non Rawat Inap 16 unit, Klinik Pratama satu buah dan Posyandu 242 unit.

Penelitian ini dilakukan di dua Negeri “desa” yaitu desa Abio dan Huku Kecil. Secara geografis, kedua negeri ini berada pada Kecamatan Elpaputih. Wilayah Kecamatan Elpaputih berada pada Wilayah Pulau Seram, dimana pada bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Taniwel Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Inamosol dan Amalatu. Selain batas wilayah jarak desa menuju ibukota kecamatan dalam Kecamatan Elpaputih menjadi faktor penting mobilitas masyarakat dan distribusi barang-barang kebutuhan.

Tabel 3. Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Elpaputih 2022.

Kecamatan	Letak Posisi	Batas Wilayah
(1)	(2)	(3)
Elpaputih	Utara	Kecamatan Taniwel Timur
	Selatan	Laut Banda
	Timur	Kabupaten Maluku Tengah
	Barat	Kecamatan Inamosol dan Amalatu

Sumber : Elpaputih Dalam Angka (BPS Seram Bagian Barat)

Masyarakat Desa Abio dan Huku Kecil merupakan keturunan suku Wemale. Jumlah penduduk suku Wemale sebanyak 7.500 orang menempati 39 desa di daerah terpencil di pedalaman Pulau Seram. Hasil penelitian dari Suku Wemale sebagai induk dari sub suku lain di Pulau Seram yang meskipun telah berinteraksi dengan masyarakat luar sejak lama tetapi sebutan orang gunung masih dijumpai. Meskipun keturunan Suku Wemale telah ada yang mendiami daerah pesisir pantai tetapi ketergantungan hidup mereka pada wilayah hutan masih sangat kuat, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat nelayan karena sebagian besar kehidupannya mengandalkan pertanian.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kehidupan suku-suku tertentu di Pulau Seram terutama di daerah pegunungan atau wilayah pedalaman masih jauh dari sentuhan pembangunan sehingga kehidupan mereka terabaikan dari pelayanan umum.

Gambar 1 : Desa Persiapan Abio



Sumber : Googel & YouTube Tangan Pengharapan

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Elpaputih 2022

Desa	Penduduk		Jumlah	Sex Rasio
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sanahu	568	558	1 126	102
Wasia	140	161	301	87
Sumeth Pasinaro	142	118	260	120
Watui	33	30	63	110
Abio Ahiolo	560	491	1 051	114
Huku Kecil	223	170	393	131
Elpaputih	981	986	1 967	99
	2 647	2 514	5 161	105

Sumber : Elpaputih Dalam Angka (BPS Seram Bagian Barat)

Tahun 2022 tercatat jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Elpaputih sebanyak 5 161 jiwa, dan kepadatan penduduk mencapai - jiwa tiap Kilometer persegi. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Kairatu sebesar 105 berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 105 jiwa penduduk laki-laki. Desa Elpaputih memiliki jumlah penduduk terbesar, 1967 jiwa, dan desa dengan penduduk terkecil yaitu desa Watui sebanyak 63

jiwa. Jika di bandingkan dengan Kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kepadatan Penduduk terpadat ada di - yaitu - Jiwa/Km² Sedangkan terjarang penduduk di Kecamatan - sebanyak - Jiwa/Km².

Tabel 5 : Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Desa di Kecamatan Elpaputih 2022 (Km)

No	Desa	Jarak (Km)
(1)	(2)	(3)
1	Sumeith Pasinaro	13
2	Abio Ahiolo	21
3	Watui	39
4	Huku Kecil	42
5	Sanahu	7
6	Wasia	6
7	Elpaputih	1

Sumber : Sumber : Elpaputih Dalam Angka (BPS Seram Bagian Barat)

Tepat terkait kerumitan akses jarak tempuh Desa Huku dan Abio ke kecamatan, serta perbandingan dengan kecamatan lain di Kabupaten Seram Bagian Barat terkait kepadatan penduduk, mari kita bahas dua hal ini secara terpisah. Kerumitan Akses Jarak Tempuh Desa Huku dan Abio ke Kecamatan, desa Huku dan Abio adalah desa yang terletak di Kabupaten Seram Bagian Barat, dan tentu saja akses ke kecamatan atau pusat pemerintahan lainnya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak geografis, kondisi infrastruktur jalan, tersebarnya permukiman di desa-desa tersebut, dan faktor alam lainnya (seperti kondisi pegunungan atau daerah pesisir).

Kerumitan akses jarak tempuh menuju kecamatan biasanya terkait dengan. Kondisi jalan menuju desa tersebut tidak mulus atau rusak, banyak medan berbukit, tidak beraspal, waktu yang diperlukan untuk mencapai kecamatan atau pusat layanan pemerintahan akan lebih lama dan lebih sulit. Jarak Tempuh, desa tersebut terletak jauh dari pusat kecamatan, waktu tempuh bisa sangat bervariasi. Misalnya, jika jarak antara desa Huku dan Abio dengan kecamatan memerlukan waktu tempuh yang lama (misalnya 9-12 jam bahkan lebih), ini akan menambah kesulitan bagi penduduk desa untuk mengakses layanan dasar. Transportasi, ketersediaan transportasi yang terbatas, seperti kendaraan pribadi yang

jarang, juga menambah kerumitan akses. Faktor Alam, wilayah Seram Bagian Barat memiliki banyak pegunungan dan hutan, sehingga akses ke kecamatan bisa sangat sulit, terutama saat musim hujan. Jembatan dan infrastruktur lainnya bisa rusak atau sulit dilalui. Kerumitan akses jarak tempuh Desa Huku dan Abio ke kecamatan kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang terbatas dan kesulitan geografis (termasuk medan berbukit atau pesisir), yang membuat waktu tempuh menjadi lebih lama.

Tabel 6. Jumlah Sekolah menurut Desa dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Kecamatan Elpaputih 2022

No	Desa	SDLB	Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ <i>Elementary Schools and Madrasah Ibtidaiyah (MI)</i>	Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ <i>Junior High School/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)</i>	Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah/ <i>Senior High School and Madrasah Aliyah</i>	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ <i>Vocational High Schools</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sumeith Pasinaro		1	1		
2	Elpaputih		1	1		
3	Huku Kecil		1	1		
4	Abio Ahiolo		2			
5	Watui					
6	Wasia					
7	Sanahu					

Sumber : Elpaputih Dalam Angka (BPS Seram Bagian Barat)

Banyaknya sarana pendidikan di Kecamatan Elpaputih sampai dengan tahun 2022, tercatat sebanyak 8 unit Sekolah atau Sarana Pendidikan. Sementara itu, rasio jumlah murid terhadap guru untuk tingkat SD sebesar 8.88, yang berarti rata-rata satu orang guru bertanggung jawab terhadap pendidikan 8.88 orang anak muridnya. Sedangkan untuk SMP sebesar 7.52.

Tabel 7. Jumlah Guru menurut Desa dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Kecamatan Elpaputih 2022.

Desa	SDLB	Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ <i>Elementary Schools and Madrasah Ibtidaiyah (MI)</i>	Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ <i>Junior High School/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)</i>	Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah/ <i>Senior High School and Madrasah Aliyah</i>	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ <i>Vocational High Schools</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumeith Pasinaro		11	3		
Elpaputih		13	12		
Huku Kecil		9	6		
Abio Ahiolo		16			
Watui					
Wasia					
Sanahu					

Sumber : Elpaputih Dalam Angka (BPS Seram Bagian Barat)

Data diatas menunjukan bahwa ketersediaan Guru sangatlah terbatas selain data ini menyebutkan jumlah tenaga guru, penelitian ini juga menemukan bahwa di desa Abio Ahiolo dimekarkan menjadi duan desa yang itu Ahiolo dan Abio. Tenaga guru setelah di konfirmasi bahwa di Desa Abio terdapat sedikitnya 3 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 7 orang tenaga honore. Sedangkan di huku kecil 3 orang guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang tenaga honore pada jenjang SD, pada jenjang SMP 2 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang tenaga honore.

Tabel 8. Jumlah Murid menurut Desa dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Elpaputih 2022

Desa	SDLB	Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ <i>Elementary Schools and Madrasah Ibtidaiyah (MI)</i>	Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ <i>Junior High School/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)</i>	Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah/ <i>Senior High School and Madrasah Aliyah</i>	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ <i>Vocational High Schools</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumeith Pasinaro		47	13		
Elpaputih		161	115		
Huku Kecil		58	30		
Abio Ahiolo		169			
Watui					
Wasia					
Sanahu					

Sumber : Elpaputih Dalam Angka (BPS Seram Bagian Barat)

Dari sisi ketersediaan infrastruktur pendidikan, Desa Abio memiliki jenjang pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola oleh Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK), sementara di Desa Huku Kecil terdapat dua jenjang pendidikan yakni SD YPPK dan SMP Negeri 3 Elpaputih. Untuk jenjang Pendidikan menengah dan perguruan tinggi, hanya tersedia di kawasan pusat Kecamatan, Kabupaten, maupun ibukota Provinsi. Ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik juga turut menjadi masalah mendasar. Sebagai contoh, di Desa Abio terdapat sedikitnya 3 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 7 orang tenaga honorer. Disebabkan kerumitan akses jalan dan jarak tempuh, para guru seringkali membutuhkan waktu paling lama seminggu untuk kembali melaksanakan tugas, bila sedang bepergian ke pusat Kecamatan maupun Kabupaten. Selama masa itu, kewajiban belajar mengajar diambil alih oleh tenaga honorer yang seluruhnya merupakan warga asli Desa dengan rata-rata tingkat pendidikan hanya lulusan SMA.

Kondisi tersebut sangatlah perhatian akan pendidikan di dua desa tersebut, jumlah murid dan guru yang sedikit membuat aktivitas pendidikan tidak berjalan dengan baik. Abio Ahiolo saat ini sudah dimekarkan sehingga Abio sudah menjadi desa, setelah konfirmasi SD di Abio hanya 43 orang kelas.

B. Analisis Hasil Penelitian

Desa Abio dan Huku Kecil berada di kawasan yang relatif terpencil dan termasuk dalam kategori daerah tertinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Daerah-daerah ini sering menghadapi tantangan besar dalam hal akses pendidikan, baik karena keterbatasan infrastruktur, jaringan transportasi, maupun sumber daya manusia. Masyarakat di kedua desa ini juga sering terhambat oleh faktor sosial-ekonomi dan keterbatasan dalam hal pelayanan publik yang memadai, termasuk pendidikan.

Pendidikan berbasis kawasan adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dengan mengoptimalkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat setempat dalam proses perbaikan pendidikan. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian program pendidikan dengan karakteristik dan kebutuhan khas daerah tersebut. Pendidikan Berbasis Kawasan Pendidikan berbasis kawasan di Desa Abio dan Huku Kecil bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dan remaja, terutama yang berada di daerah terpencil.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat agar mereka aktif dalam mendukung pendidikan dan pembangunan kawasan.
4. Menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat mengatasi hambatan yang ada, seperti akses terbatas ke sekolah dan ketidakmampuan untuk membeli materi ajar.

Pendidikan berbasis kawasan di Desa Abio dan Huku Kecil merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di daerah tertinggal. Dengan melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor

swasta, hingga LSM, pendidikan dapat dikembangkan secara inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis kawasan juga memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi hak anak-anak, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Melalui kolaborasi yang efektif dan pemanfaatan potensi lokal, Desa Abio dan Huku Kecil dapat memanfaatkan pendidikan sebagai alat untuk mengatasi keterbatasan sosial dan ekonomi yang ada, serta untuk membangun ketahanan masyarakat pasca-krisis.

Pendidikan berbasis kawasan adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dengan mengoptimalkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat setempat dalam proses perbaikan pendidikan. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian program pendidikan dengan karakteristik dan kebutuhan khas daerah tersebut. Pendidikan Berbasis Kawasan Pendidikan berbasis kawasan di Desa Abio dan Huku Kecil bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dan remaja, terutama yang berada di daerah terpencil.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat agar mereka aktif dalam mendukung pendidikan dan pembangunan kawasan.
4. Menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat mengatasi hambatan yang ada, seperti akses terbatas ke sekolah dan ketidakmampuan untuk membeli materi ajar.

Ulasan di atas menunjukkan bahwa analisis data ini, akan difokusikan untuk melihat pendidikan berbasis kawasan dan komunitas, akan dimulai dengan melihat pelayanan dasar dan akses pendidikan di Huku Kecil dan Abio kedua desa ini merupakan fokus kajian pada penelitian ini.

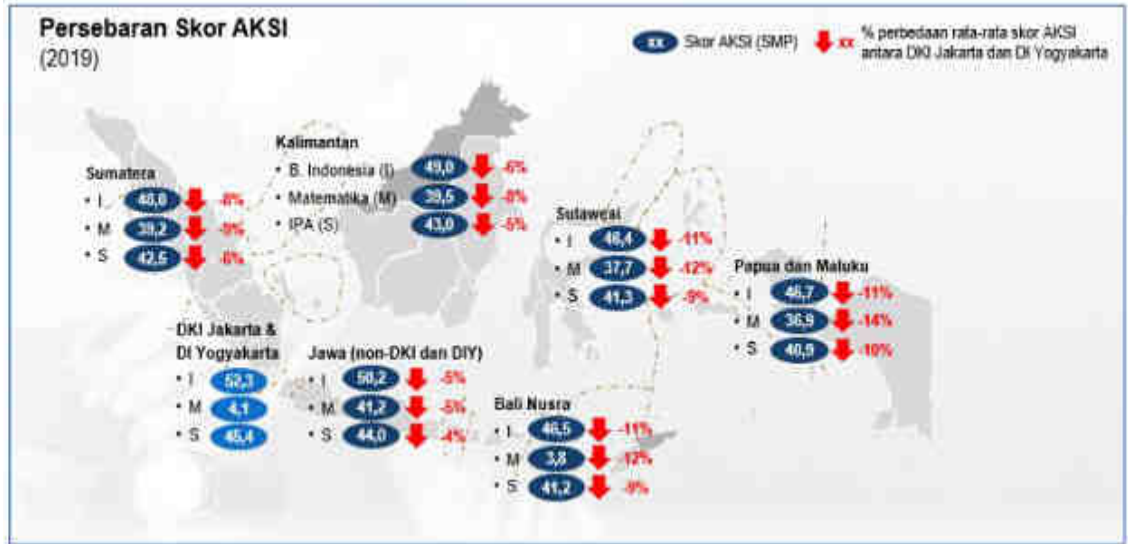
1. Pelayanan dasar dan Akses pendidikan di Abio dan Huku Kecil

Sub bab ini membahas pelayanan dasar dan akses pendidikan, kedua konten ini disangajakan untuk di bahas secara bersama, karena pelayanan dasar merupakan factor kunci penunjang komunitas untuk akses pendidikan. Selain itu juga ditemukan bahwa pelayanan dasar pada kedua desa sangat buruk sehingga komunitas sulit untuk akses terhadap pendidikan.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi agar mereka dapat berkembang secara optimal. Namun, kenyataannya, terdapat ketimpangan akses pendidikan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama di kawasan terpencil seperti Desa Huku Kecil dan Desa Abio yang terletak di Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Masyarakat di kawasan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh pendidikan yang layak, termasuk kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala geografis yang menghambat mobilitas dan akses ke layanan pendidikan.

Kedua desa tersebut terletak di daerah pengunungan seram bagian barat dengan keadaan yang di alami, situasi ini kemudian merujuk pada pehaman Kemendikbud menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini antara lain terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). AKSI mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia. Penilaian ini bersifat low stake karena skor AKSI tidak digunakan sebagai salah satu faktor penentu kelulusan atau kenaikan kelas, sehingga kajian yang berdasarkan skor AKSI diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa SD.

Gambar 2. Memperlihatkan distribusi nilai AKSI SMP pada tahun 2019



Sumber : Dokumen Salinan Permendikbud 20 Tahun 2022

Seperti ditunjukkan oleh Gambar 7, pengelompokan nilai AKSI berdasarkan pulau-pulau dan dua provinsi dengan nilai tertinggi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis. Pulau-pulau di timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara menunjukkan kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dalam nilai AKSI. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan geografis, regulasi, dan tata kelola. Dari segi geografis, kepulauan Indonesia yang luas memiliki sebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di beberapa pulau kecil, sulit didirikan sekolah ataupun mendatangkan guru. Mobilitas guru antar daerah juga terbatas, seringkali terpusat di perkotaan dan pulau-pulau besar. Tidak banyak guru yang dapat ditempatkan di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Dari segi regulasi, pemanfaatan berbagai program dukungan pemerintah untuk pemerataan mutu belum tepat guna dan tepat sasaran.

Abio dan huku kecil bagaian dari daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) pendidikan di desa tersebut banyak kendala dengan ketersediaan pelayanan dasar. Pelayanan dasar dan akses pendidikan di Desa Abio dan Huku Kecil, Kecamatan

Elpaputi, kita perlu memperhatikan beberapa aspek yang melibatkan kebijakan pemerintah, kondisi geografis, serta tantangan dan potensi yang ada di kedua desa tersebut.

Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan sering disebabkan oleh faktor-faktor struktural dan kontekstual yang kompleks. Di kawasan terpencil, seperti Desa Huku Kecil dan Desa Abio, kesenjangan ini mencakup berbagai aspek, antara lain. Akses ke sarana pendidikan fasilitas pendidikan yang terbatas, seperti gedung sekolah yang tidak memadai, kurangnya alat bantu pendidikan, serta keterbatasan buku dan materi pembelajaran. Akses ke tenaga pengajar yang berkualitas, keterbatasan jumlah guru yang terlatih dan berkualitas di daerah terpencil, serta tingkat rotasi guru yang tinggi, menyebabkan kualitas pendidikan sering kali terabaikan. Hambatan geografis, jarak yang jauh antara desa dengan pusat pendidikan dan minimnya transportasi menyebabkan anak-anak kesulitan untuk mengakses pendidikan secara teratur.

Pelayanan dasar mencakup beberapa sektor penting yang menjadi hak dasar setiap warga negara, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur lainnya. Di desa-desa seperti Abio dan Huku Kecil, pelayanan dasar seringkali menjadi tantangan besar karena keterbatasan infrastruktur, anggaran, dan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa komponen pelayanan dasar yang perlu diperhatikan sebagai factor dasar untuk akses pendidikan sekaligus menjawab tantangan masyarakat yang selama ini mempunyai harapan untuk keliuar dari krisis yang ada.

Di kedua desa tersebut sangat keterbatasan infrastruktur seperti jalan yang rusak atau tidak memadai sering menghambat mobilitas warga desa. Hal ini juga memengaruhi distribusi barang dan jasa, termasuk distribusi obat-obata, kebutuhan pangan, dan akses ke fasilitas kesehatan atau pendidikan di wilayah yang lebih besar. Pengadaan jalan yang bisa diakses sepanjang tahun sangat penting untuk memperlancar pelayanan dasar di desa.

Abio itu anak dusun dari negeri Haiolo jadi abio sendiri masih berstatus desa persiapan. Untuk pembangunan di Abio sendiri memang masih tatinggal sama skali karna katong ada di posisi daerah pegunungan dengan akses jalan yang seng bagus

sama skali. Katong biasa kalau mau dari Abio turun ke pante ktong naik ojek itu bayar 300rb per kapala dana aja juga yang jalan kaki. Jarak dari Abio ke pangkalan ojek kali tala itu 38 sedangkan jarak dari Abio ke Huku kecil itu 6 kilo. Kondisi jalan juga memang para sama skali; jalan ini masih jalan kabong terus kalau musim hujan juga masyarakat seng bisa terlalu sering ke pante karna jalan bapecek skali dan motor-motor juga seng bisa turun. Jadi di Abio ini pembangunan bapa dong bisa bayangkan saja, memang pembangunan memprihatinkan skali karna akses jalan yang sangat para¹. Katong Abio itu kan desa persiapan, jadi anggaran desa itu katong dapat dari desa induk Ahiolo. Jadi untuk pembangunan katong seng bisa biking banyak karna anggaran yang kecil ditambah lagi dengan akses jalan yang sangat rumit².

Berdasarkan uraian mengenai kondisi Abio, sebuah desa persiapan yang terletak di daerah pegunungan dengan akses jalan yang buruk, masalah utama Abio terletak di daerah pegunungan yang sulit dijangkau, dengan akses jalan yang sangat terbatas dan dalam kondisi sangat buruk, terutama pada musim hujan. Jalan yang ada merupakan jalan kabong (jalan setapak atau jalan tanah), yang hanya bisa dilalui kendaraan tertentu dalam kondisi cuaca tertentu. Hal ini menghambat mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk pengangkutan barang dan pembangunan. Akses Transportasi Mahal: Masyarakat harus membayar biaya ojek yang sangat mahal, sekitar 300 ribu IDR per orang, untuk menuju ke tempat yang lebih mudah diakses seperti pantai atau ke pangkalan ojek Kali Tala yang berjarak 38 km dari Abio. Alternatifnya, mereka harus berjalan kaki, yang tentunya sangat melelahkan dan tidak efisien. Kondisi Jalan yang Berbahaya: Jalan yang dilalui sangat berbahaya, terutama pada musim hujan, karena kondisi jalan menjadi berlumpur, licin, dan sulit dilalui oleh kendaraan, bahkan sepeda motor sekalipun.

¹ Hasil Wawancara Kepala Desa Abio “*Bagaimana perkembangan desa ibu saat ini?*”

² Hasil Wawancara Kepala Desa “*Kondisi pelayanan dasar seperti ini apa strategi ibu untuk pengembangan desa?*”

Dari permasalahan tersebut berdampak pada Mobilitas Masyarakat Abio dimana masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan perjalanan sehari-hari, baik untuk bekerja, berdagang, maupun menjalankan aktivitas sosial lainnya. Ini mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial di desa tersebut. Biaya transportasi yang tinggi, mahal dan terbatasnya transportasi mengakibatkan biaya hidup yang tinggi, yang semakin memperburuk kesejahteraan masyarakat setempat. Ini juga mempengaruhi potensi untuk memasarkan produk lokal dan meningkatkan perekonomian desa. Keterbatasan pendidikan, infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, mungkin tidak ada sekolah yang cukup dekat, atau fasilitas pendidikan yang terbatas, membuat generasi muda Abio sulit mengakses pendidikan yang layak. Ini bisa memperburuk kesenjangan pendidikan antara desa ini dan desa lainnya yang lebih maju.

Nyong katong punya Negeri Huku Kecil ini banyak masalah skali. Dan keadaan dalam negeri sangat memprihatinkan. Dari pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan kacau sekai; apa lagi masalah jalan lebih hancur lai.³ Beta sendiri sebagai Raja bersama dengan pemerintah negeri dalam memikirkan pembangunan negeri selalu terkendalah oleh akses jalan. Misalnya katong mau membangun rumah saja muat bahan dari bawa sampe ke Huku sini satu motor itu bayar 300ribu. Kalau membangun di Huku sini dua kali lipat anggarannya. Karna harga angkut barang dari bawa ke atas itu lumayan. Katong kebanyakan rumah di atas itu masih pake papan semua.⁴

Berdasarkan uraian yang Anda sampaikan tentang kondisi di Negeri Huku Kecil, berikut adalah analisis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah setempat, serta dampaknya terhadap sektor-sektor vital seperti perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Akses jalan yang buruk menjadi hambatan besar dalam pembangunan di Huku Kecil. Biaya transportasi yang tinggi untuk mengangkut barang dan material menjadi salah satu penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan. Bisa dilihat dari biaya angkut barang yang

³ Hasil Wawancara Kepala Desa Huku Kecil “*Bagaimana perkembangan desa ibu saat ini?*”

⁴ Hasil Wawancara Kepala Desa Huku Kecil “*Kondisi pelayanan dasar seperti ini apa strategi ibu untuk pengembangan desa?*”

mahal, untuk mengangkut bahan bangunan ke Huku Kecil, biaya transportasi mencapai 300 ribu IDR per motor. Hal ini menjadikan pembangunan rumah atau infrastruktur di Huku Kecil jauh lebih mahal biaya angkut barang dapat menggandakan anggaran yang diperlukan. Masalah ini kemudian berdampak pada pembangunan infrastruktur terhambat: Biaya angkut yang tinggi memperlambat pembangunan perumahan dan fasilitas dasar. Ini memengaruhi kualitas hidup masyarakat yang sebagian besar masih tinggal di rumah berbahan papan, yang cenderung tidak tahan lama dan kurang nyaman.

Keadaan diatas menunjukan bahwa kedua desa tersebut sangat terisolir karena tidak ada akses jalan yang layak sehingga memperlambat proses pembagunan desa, bahkan dengan kondisi pelayanan dasar tersebut pada musim hujan dapat melumpuhkan berbagai aktivitas.

Akses terhadap pendidikan tidak terlepaspisahkan dari ketersediaan pelayanan dasar, pelayanan dasar yang di maksud dalam penelitian ini akses jalan, infratraktur pendidikan dan juga kesehatan sebagai pola aktivitas sosial masyarakat desa daerah 3T. Pelayanan dasar juga memiliki dampak yang signifikan terhadap akses dan kualitas pendidikan di berbagai lapisan masyarakat. Ketika pelayanan dasar ini terpenuhi, masyarakat terutama anak-anak akan lebih mudah mengakses pendidikan yang berkualitas. Berikut beberapa pandangan yang menggambarkan hubungan antara pelayanan dasar dan akses pendidikan:

Pertama Kesehatan yang baik mendukung pendidikan kesehatan adalah salah satu komponen penting dalam pelayanan dasar. Anak-anak yang sehat lebih cenderung hadir di sekolah dan memiliki kapasitas belajar yang lebih baik. Sebaliknya, masalah kesehatan seperti gizi buruk atau penyakit menular dapat mengganggu kehadiran dan konsentrasi siswa, yang akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan yang mereka terima. Akses ke layanan kesehatan yang baik akan memastikan anak-anak tetap sehat dan siap belajar.

Kedua akses jalan dan dampaknya terhadap pendidikan di wilayah seperti Abio dan Huku Kecil (nama wilayah fiktif yang saya anggap mewakili daerah terpencil atau pedesaan) dapat dilihat dari beberapa perspektif. Akses jalan yang baik dan aman sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan di daerah-daerah terpencil, karena jalan

yang rusak, tidak terjangkau, atau tidak ada sama sekali bisa menimbulkan hambatan besar bagi anak-anak, guru, serta orang tua dalam mendukung proses pendidikan. Berikut adalah beberapa dampak akses jalan terhadap pendidikan di daerah seperti Abio dan Huku Kecil:

Akses jalan yang buruk sering kali membuat sekolah-sekolah di daerah terpencil kesulitan mendapatkan pasokan sumber daya yang diperlukan, seperti buku, alat tulis, atau bahan ajar lainnya. Selain itu, guru yang tinggal jauh dari sekolah atau sulit mencapainya mungkin enggan untuk mengajar di daerah tersebut, mengurangi kualitas pengajaran yang diterima siswa.

Pendidikan yang tidak merata jika akses jalan terbatas, tidak semua anak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah-sekolah utama mungkin terpaksa berhenti sekolah atau hanya mendapatkan pendidikan yang terbatas, yang memperburuk ketimpangan pendidikan. Akses jalan yang buruk mempersulit pengiriman bahan ajar atau alat pendidikan dari pemerintah atau lembaga pendidikan ke sekolah-sekolah di daerah terpencil. Sekolah-sekolah tersebut mungkin kekurangan alat bantu pendidikan, komputer, dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran yang lebih modern.

Sekolah yang terletak di daerah yang sulit diakses juga mungkin kesulitan untuk mendapatkan pemeliharaan yang tepat waktu, seperti perbaikan bangunan atau fasilitas lainnya, karena sulitnya transportasi atau biaya yang tinggi untuk memperbaiki infrastruktur. Keterbatasan komunikasi dan partisipasi, orang tua yang tinggal di daerah dengan akses jalan yang buruk mungkin tidak bisa terlibat secara aktif dalam kehidupan pendidikan anak-anak mereka, seperti menghadiri rapat orang tua, kegiatan sekolah, atau memberikan dukungan belajar di rumah. Ketidakhadiran orang tua dalam proses pendidikan anak dapat mempengaruhi motivasi dan prestasi akademik anak-anak.

Beban ekonomi dan waktu, orang tua yang kesulitan mencapai sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengurus administrasi pendidikan anak-anak mereka mungkin akan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke jenjang

yang lebih tinggi, terutama jika mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Di banyak daerah terpencil, transportasi publik yang tidak teratur atau tidak ada sama sekali menjadi masalah besar. Anak-anak, terutama di daerah yang akses jalannya buruk, mungkin harus berjalan kaki jauh ke sekolah. Dalam beberapa kasus, transportasi untuk guru juga menjadi tantangan—guru-guru yang sulit menjangkau sekolah atau yang harus menempuh perjalanan jauh dari tempat tinggal mereka bisa kehilangan motivasi untuk mengajar, atau bahkan memilih untuk pindah ke sekolah yang lebih mudah diakses.

Fokus yang terganggu ketika akses jalan tidak memadai, baik siswa maupun guru akan terpengaruh oleh stres perjalanan yang panjang dan sulit. Hal ini dapat mengurangi konsentrasi dan efektivitas mereka selama proses belajar mengajar. Beberapa sekolah, terutama yang ada di pedesaan, memiliki program pendidikan luar ruang, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kunjungan pendidikan, atau pelatihan tambahan. Akses jalan yang buruk akan membatasi kemampuan sekolah untuk melaksanakan program-program tersebut, yang berdampak pada perkembangan keterampilan siswa secara lebih holistik. Di daerah dengan akses jalan terbatas, sulit untuk menyelenggarakan program-program pendidikan kesehatan atau pelatihan bagi masyarakat dan siswa. Akses jalan yang buruk juga menghambat distribusi layanan kesehatan, yang dapat memengaruhi kesehatan fisik anak-anak dan berujung pada absensi atau gangguan lainnya dalam pendidikan mereka.

Akses jalan yang buruk memperburuk isolasi sosial di daerah pedesaan, menjadikan mereka terputus dari perkembangan dan sumber daya pendidikan yang ada di wilayah lebih berkembang. Hal ini memperburuk kesenjangan sosial dan pendidikan, di mana anak-anak dari daerah dengan infrastruktur yang baik mendapatkan kesempatan lebih besar untuk sukses, sementara anak-anak dari daerah terisolasi cenderung tertinggal.

Akses jalan yang baik merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil seperti Abio dan Huku Kecil. Infrastruktur jalan yang memadai membuka peluang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Sebaliknya, jika akses jalan terbatas, anak-anak menghadapi kesulitan besar untuk mencapai sekolah, baik dalam hal jarak

maupun waktu yang dibutuhkan. Dampaknya, ketimpangan dalam pendidikan semakin sulit untuk diatasi, dan peluang untuk perbaikan sosial dan ekonomi menjadi terbatas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik di daerah-daerah terpencil adalah langkah penting untuk mencapai pemerataan pendidikan yang lebih adil.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Infrastruktur yang Memadai Infrastruktur pendidikan yang baik juga menjadi bagian dari pelayanan dasar. Sekolah dengan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, alat pembelajaran yang cukup, dan akses internet, sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Jika pelayanan dasar dalam sektor pendidikan, seperti fasilitas sekolah, pengajaran, dan pelatihan guru, tidak memadai, maka kualitas pendidikan yang diberikan akan sangat terbatas.

Di Abio itu cuma ada SD dan Sd itu di bawa yayasan J. B Sitanala, sehingga dana pendidikan itu katong dapat dari Sinode GPM. Untuk kondisi sekola di Abio sendiri memang para sama skali, beberapa gedung sudah rusak dan papan tulis itu seng bisa di gunakan lai. Gedung yang rusak itu dari dinding, plafon, atab juga. Perpustakaan katong punya ada tapi buku-bukunya seng talalu banyak dan masih banyak yang kurang.⁵ Katong seng bisa bantu pendidikan pakai dana desa sebab katong punya dana desa ini kecil dan kalaupun bantu katong Cuma bisa lewat penertiban proses pembelajaran⁶. Bapa. Katong punya pendidikan di SD Kristen Abio ini mimprihatinkan skali. Bangunan yang sdh rusak-rusak dari dinding sudah balobang, plafon sdh bolong-bolong dan papan tulis yang sudah tidak bisa digunakan tapi paksa saja par pake akang. Di tambah lagi dengan kondisi jalan yang ekstirm juga menjadi factor penting pendidikan di SD Kristen Abio seng berkembang. Ifrastruktur: dinding sekolah, plafon, dan atab bangunan. Suprastruktur: papan tulis, tenaga pengajar, buku-buku dan rak buku di perpustakaan⁷

⁵ Hasil Wawancara Kepala Desa Abio *“Bagaimana ibu pejabat melihat masalah pendidikan di negeri ini?”*

⁶ Hasil Wawancara Kepala Desa *“apakah ada kebijakan pemerintah desa yang memperhatikan pendidikan?”*

⁷ Hasil Wawancara Tenaga Pendidik di SD Kristen Abio *“Bapa/ibu sebagai tenaga pendidik bagaimana melihat pendidikan di negeri ini*

1. Dapat interpretasi bahwa pendidikan di Abio sangat tergantung pada Yayasan dan Sinode GPM Sekolah di Abio di bawah yayasan J.B. Sitanala dan mendapatkan dukungan dana pendidikan dari Sinode GPM. Ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut sangat bergantung pada bantuan eksternal untuk membiayai operasionalnya, dan kemungkinan besar mereka tidak dapat mandiri dalam hal pendanaan.
2. Kondisi Fasilitas Sekolah yang Buruk. Kondisi fisik sekolah di Abio sangat memprihatinkan, dengan banyaknya gedung yang rusak, termasuk dinding, plafon, dan atap yang sudah tidak layak. Papan tulis yang sudah tidak bisa digunakan lagi menunjukkan bahwa fasilitas untuk proses pembelajaran sangat terbatas. Kondisi ini bisa mempengaruhi kualitas pembelajaran, karena lingkungan yang tidak memadai dapat mengganggu konsentrasi siswa dan mengurangi efektivitas pengajaran.
3. Keterbatasan Sumber Belajar Perpustakaan sekolah memang ada, tetapi jumlah buku yang tersedia sangat terbatas, dan banyak koleksi yang kurang. Hal ini menghambat upaya peningkatan literasi dan akses siswa terhadap berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya pengetahuan mereka. Keterbatasan ini juga menggambarkan minimnya investasi pada pendidikan yang berkualitas.
4. Dana Desa yang terbatas masalah lainnya adalah keterbatasan dana desa yang tidak cukup besar untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. “Katong seng bisa bantu pendidikan pakai dana desa sebab katong punya dana desa ini kecil dan kalaupun bantu katong Cuma bisa lewat penertiban proses pembelajaran”⁸. Dana desa memang dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, namun jumlahnya kecil dan hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat administratif, seperti penertiban proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk membantu pendidikan, anggaran yang terbatas membuat upaya tersebut sangat terbatas.

Sekolah di Abio menghadapi tantangan besar terkait dengan fasilitas yang rusak, terbatasnya sumber daya pembelajaran, dan keterbatasan dana. Untuk meningkatkan

⁸ Hasil Abo dan Huku Kecil Wawancara Selama ini apakah ada kebijakan pemerintah desa yang memperhatikan pendidikan?

kualitas pendidikan, diperlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, yayasan, maupun komunitas, guna mencari solusi yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, terutama dalam hal perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas bahan ajar.

Bapa. Kalau untuk pendidikan sio katong di Abio ini pendidikannya seng buruk skali. Sekolah rusak-rusak, mau pigi sekolah SMP di Huku Kecil sabalah saja ana-ana dong ini jalan 6 kilo setiap hari. Ada juga yang pigi sekola di pante atau di Ambon, Elpaputi, Piru dan Kairatu lalu dong tinggal itu biasa tapiara di orang atau tinggal dengan keluarga. Bagai dengan masalah jalan sampai pendidikan bukan lagi krisis tetapi sanagat krisis⁹.

Krisis pendidikan yang mendalam, pernyataan bahwa masalah jalan dan pendidikan "bukan lagi krisis tetapi sangat krisis" menegaskan bahwa situasi di Abio sudah sangat buruk dan memerlukan perhatian segera. Pendidikan sudah menjadi masalah yang sangat mendesak di wilayah tersebut, dan jika tidak ada upaya yang signifikan untuk memperbaiki kondisi ini, maka akan berisiko merugikan generasi muda dalam jangka panjang. Kondisi ini juga dikonfirmasi oleh tokoh pemuda seperti yang dikatakan di bahwa ini:

Kaka, kalau bagi beta pendidikan di katong punya negeri ini sangat tidak baik. Jadi bagi beta kondisi ini bagian dari krisis, karna memang kondisi pendidikan di ktong punya negeri ini kacau skali. Mulai dari gedung yang sudah rusak-rusak, guru yang kadang kalau turun ke bawa lama baru naik karna memang jalan yang sangat hancur.¹⁰

Ade katong punya sekolah di atas ini bangunan itu sudah bolong-bolong dari dinding sekolah sampe ke atab. Mau pebaiki akang tapi jalan yang stengah mati baru jauh skali ini yang biking sekolah itu dia rusak sja bagitu. Baru kalau guru-guru juga dong kalau turun ke pante itu dong lama baru naik ke atas lai par tugas.

⁹ Hasil Wawancara Masyarakat Desa Abio “*Bagaimana bapa/ibu melihat masalah pendidikan di negeri ini?*”

¹⁰ Wawancara Tokoh Pemuda Abio “*Bagaimana pemuda melihat masalah pendidikan di negeri ini?*”

Ya keadaan kaya bagini katong seng bisa parlente ade. Memang bagitu sudah krisis. Dan kalau ada kata lebih dari krisis kaya yang kaka bilang itu maka itu akang sudah¹¹

Gambar 3 : Sekolah Huku Kecil



Sumber : Hasil Dokumentasi Penelitian

Berdasarkan deskripsi yang kamu berikan, saya coba menganalisis beberapa masalah yang terjadi di sekolah tersebut, baik dari segi infrastruktur, aksesibilitas, maupun kondisi umum yang berdampak pada kualitas pendidikan. Kondisi Bangunan yang Rusak Bangunan sekolah yang sudah bolong-bolong, mulai dari dinding hingga atap, menggambarkan kondisi fisik sekolah yang sangat memprihatinkan. Ini bisa berpotensi membahayakan para siswa dan guru, dan juga mengganggu proses belajar mengajar. Dengan kondisi bangunan yang rusak, tentunya kenyamanan dan keselamatan dalam beraktivitas menjadi terganggu. Keadaan seperti ini bisa memperburuk fokus siswa

¹¹ Wawancara Masyarakat Desa Huku Kecil “*Bagaimana pemuda melihat masalah pendidikan di negeri ini?*”

selama pelajaran karena adanya gangguan dari lingkungan sekitar, baik itu suara berisik karena kerusakan ataupun rasa tidak aman akibat bangunan yang tidak stabil.

Gambar 4 : Akses Jalan dari Desa Jln, Trans Srama-desa Sumeth Persinaro-Abio-Huku Kecil.



Sumber : Dokumentasi Tim Peneliti

Gambar diatas menunjukan keberadaa pelayanan dasar jalan menuju kedua desa tersebut sangat tidak layak bahkan berbahaya bagi mereka. Situasi jalan ini menunjukan aksesibilitas ke dua negeri sangat sulit, masyarakat mengalami kusulitas untuk mempercepat pembaguanan dan akses terhadap pendidikan. Katong punya jalan naik kea bio dan huku itu pake jalan kebun kalau katong turun itu kadang pake ragit, jalan pagi sampai malam¹². Masyarakat melakukan perjalanan kurang lebih satu hari dengan menggunakan rakit atau juga mengikuti jalan tani yang sudah pernah dilewati, dalam melakukan perjalanan masyarkat kemudian terlebih dahulu sudah memperhatikan kondisi alam, karena ketika hujan medan lebih ekstrim selian itu juga mereka telah mempersiapkan bekal komsumsi yang dapat diperlukan ketika melakukan perjalanan.

¹² Wawancara Masyarakat desa Huku Kecil “Menurut bapa/ibu bagaimana masalah akses jalan?”

Kondisi ini kemudian dilihat sebari dengan akses Pendidikan, desa Abio dan Huku Kecil dengan keterbatas sekolah mereka melanjutkan sekolah di desa yang lain. Desa Abio hanya memiliki SD YPPK mereka melanjutkan studi lanjut di desa Huku Kecil dan desa yang lain. Masalah Aksesibilitas Jalan menuju sekolah yang jauh dan sulit dicapai tentu menjadi masalah besar, terutama bagi para guru dan siswa yang harus melintasi medan yang sulit. Akses yang tidak memadai membuat perjalanan ke sekolah menjadi lebih lama dan melelahkan, yang akhirnya bisa mengganggu kinerja guru dan efektivitas pengajaran. Bagi siswa, perjalanan yang panjang dan sulit bisa membuat mereka merasa lelah sebelum memulai pelajaran, yang tentu saja mempengaruhi konsentrasi dan partisipasi mereka di kelas.

Sepertinya, sekolah ini sedang menghadapi krisis besar terkait fasilitas dan sumber daya. Dari pernyataan yang ada, bisa dilihat bahwa kondisi ini bukan hanya masalah fisik (seperti kerusakan bangunan), tetapi juga mencakup krisis dalam hal pemeliharaan dan perbaikan. Tanpa adanya perbaikan yang tepat dan pemeliharaan bangunan secara berkala, kerusakan akan semakin parah dan akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk diperbaiki. Di sisi lain, sekolah yang kekurangan fasilitas dan infrastruktur yang memadai berpotensi mengurangi kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Guru), jika guru-guru mengalami kesulitan dalam mencapai sekolah, ini juga bisa berdampak pada kualitas pengajaran yang diberikan. Guru yang lelah dan kesulitan dalam perjalanan akan cenderung kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perjalanan yang memakan waktu bisa membuat guru kehilangan waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk mempersiapkan materi atau kegiatan lain yang lebih produktif.

Dampak pada Mentalitas dan Motivasi, Dalam kondisi seperti ini, bisa jadi para siswa, guru, dan orang tua merasa kurang termotivasi atau tertekan oleh situasi yang ada. Ketika infrastruktur rusak dan akses sulit, rasa putus asa bisa muncul, karena merasa tidak ada perbaikan yang signifikan dalam waktu dekat. Hal ini bisa mempengaruhi semangat belajar dan bekerja, baik di pihak siswa maupun pengajar.

2. Ketahanan Komunitas Pasca Krisis Pendidikan

Bagian ini membahas tentang ketahanan masyarakat pasca krisis yang di alami dengan berpatokan pada konsep ketahanan komunitas pasca krisis yaitu, *coping*, *adaptive*, dan *transformative* masyarakat desa dalam rangka membangun sistem pendidikan komunitas yang berdampak pada transformasi sumber daya manusia.

Ketahanan komunitas merujuk pada kemampuan suatu komunitas untuk bertahan dan pulih dari berbagai tantangan, baik itu krisis, perubahan sosial, bencana alam, maupun kondisi-kondisi yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan kehidupan bersama dalam komunitas tersebut. Lebih dari sekadar bertahan, ketahanan komunitas juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi, berkembang, dan menjaga keberlanjutan dalam menghadapi dinamika dan perubahan yang terjadi.

Ketahanan komunitas sering kali dipandang dalam beberapa dimensi, seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Setiap dimensi ini saling terkait dan memengaruhi satu sama lain dalam membentuk daya tahan sebuah komunitas terhadap berbagai ancaman. Ketahanan komunitas tidak hanya bergantung pada faktor eksternal (misalnya bencana alam atau krisis ekonomi), tetapi juga pada faktor internal, seperti solidaritas sosial, kepemimpinan, dan kapasitas organisasi lokal.

Ketahanan komunitas pasca krisis pendidikan di Desa Abio dan Huku Kecil dapat dilihat sebagai kemampuan komunitas tersebut untuk bertahan, pulih, dan berkembang kembali setelah mengalami gangguan atau penurunan dalam sektor pendidikan. Krisis pendidikan, dalam hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, tidak tersediannya pelayanan dasar, (Kesehata, ekonomi, akses jalan, infrastruktur sekolah) dan kebijakan pendidikan yang tidak memadai. Ketahanan ini mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun sistem pendidikan itu sendiri.

a. Dimensi Sosial dan Budaya

Komunitas yang tahan banting setelah krisis pendidikan biasanya memiliki struktur sosial yang solid dan saling mendukung antar anggota komunitas. Dalam konteks Desa Abio dan Huku Kecil, ketahanan sosial dapat dilihat dari bagaimana anggota masyarakat termasuk keluarga, tokoh masyarakat, dan pemuda bekerja sama

untuk memastikan kelangsungan pendidikan. Misalnya, kelompok pemuda atau relawan mungkin terlibat dalam inisiatif belajar bersama, atau orang tua yang bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengatasi kekurangan fasilitas dan bahan ajar.

Selain itu, faktor budaya juga berperan penting dalam ketahanan. Jika komunitas memiliki nilai-nilai yang kuat terkait pentingnya pendidikan, meski dalam kondisi yang sulit, masyarakat tetap berusaha untuk menjaga kelangsungan pendidikan, misalnya dengan menyelenggarakan kegiatan belajar secara informal di luar jam sekolah atau mencari cara untuk mendatangkan guru secara sukarela.

Katong punya kepedulian ada par katong punya ana-ana ini tapi katong mau buat bagaimana par biking bae sekolah itu sedangkan jalan saja hancur model ini¹³

Kalau rapat orang tua murid itu kepla sekola jaga minta katong warga par baku bantu untuk ambil bahan di kali atau swadaya warga. Cuma akses jalan ini lagi-lagi yang jadi halangan ade. Katong ambil barang mungkin satu dua kali sja lalu sisanya seng bisa ambil lai karna orang cape dan guru-guru juga mangarti itu jadi ahirnya sekolah rusak akang bagitu saja. Mau bayar ojek jua mar mahal talalu ade, 1 motor saja 300rb baru orang punya motor juga pikir panjang jang sampe motor rusak lai karna jalan memang hancur skali¹⁴

Masyarakat mengungkapkan sebuah gambaran yang jelas mengenai kesulitan yang dihadapi oleh mereka terkait dengan kondisi jalan yang rusak parah, yang menghambat mereka untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah mereka. Berikut adalah inti dari wawancara yang dijelaskan dengan lebih terperinci. Dalam kesulitan mereka tetap merasa kepedulian terhadap pendidikan anak-anak, Mereka menginginkan agar pendidikan anak-anak mereka bisa berjalan lebih baik, namun mereka kesulitan untuk membuatnya terwujud karena faktor akses dan sarana yang terbatas.

¹³ Hasil Wawancara masyarakat Huku Kecil “apakah ada usaha bapa/ibu untuk mengurangi masalah pendidikan saat ini?”

¹⁴ Hasil Wawancara masyarakat Huku Kecil “Apa bentuk usaha yang bapa/ibu lakukan untuk mengatasi masalah pendidikan?”

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat adalah kondisi jalan yang rusak parah. Mereka mencoba untuk bekerja sama dalam rapat orang tua murid, di mana kepala sekolah meminta warga untuk saling bahu-membahu membantu mengambil bahan dari kali atau melakukan swadaya untuk memperbaiki fasilitas sekolah. Namun, usaha ini sering terhenti karena akses jalan yang rusak, yang membuat prosesnya sangat sulit dan tidak efektif.

Walaupun ada usaha untuk mengambil bahan dari kali atau melakukan perbaikan lainnya, warga merasa sangat terbatas oleh tenaga dan sumber daya. Mereka hanya mampu melakukannya satu atau dua kali karena kelelahan dan keterbatasan tenaga. Setelah itu, mereka tidak bisa melanjutkan kegiatan tersebut karena capek dan merasa upaya mereka sia-sia jika kondisi jalan tidak diperbaiki. Para guru juga memahami keadaan ini dan tidak bisa menyalahkan warga karena mereka juga merasakan dampaknya. Harga ojek yang sangat mahal sekitar 300 ribu rupiah per motor merupakan penghalang bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa motor yang digunakan untuk mengangkut barang atau bahkan untuk ke sekolah akan rusak karena kondisi jalan yang sangat buruk. Warga pun menjadi ragu untuk menggunakan jasa ojek, karena resiko kerusakan motor sangat tinggi.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka di kawasan dengan infrastruktur yang buruk. Walaupun ada usaha untuk memperbaiki kondisi sekolah melalui kerja sama dan swadaya, masalah utama tetap terletak pada aksesibilitas jalan yang sangat buruk. Tanpa perbaikan jalan yang memadai, segala upaya perbaikan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan akan terhambat.

Dari usah dan dinamikan akses jalan yang tidak baik mereka juga berfikir untuk anak-anak mereka tetap bersekolah, setelah anak-anak lulus pada jenjang pendidikan dasar dan menegah mereka dapat pergi bersekolah di desa yang lain, kecamatan mau pun di Kabupaten Maluku Tengah (Masohi).

Katong itu kebiasaan kalau ada kenalan atau keluarga di bawa, katong pigi bicara lalu katong punya ana dong ini kalau sekolah di Kairatu, Masohi,

Sanahu, Elpaputi dll itu dong tinggal di dorang punya rumah.¹⁵ Sangat membantu ade. Karna katong punya sekolah di atas ini Cuma SD deng SMP saja, jadi mau lanjut sekolah musti turun ke bawa baru dong kan seng mungkin mau jalan bolak balik ke Huku setiap hari to. **Jadi dong tinggal tapiara di kenalan** saja tau tinggal di keluarga nanti libur-libur baru dong balik ke kampung.¹⁶

Dari hasil wawancara yang kamu sampaikan, berikut adalah penjelasan yang bisa diambil: Penuturan tersebut menggambarkan kebiasaan orang-orang di daerah tersebut terkait dengan pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Dikatakan bahwa ketika ada kenalan atau keluarga yang tinggal di tempat lain, orang-orang tersebut sering kali akan pergi bersama untuk berbicara atau bertemu, lalu tinggal di rumah kenalan atau keluarga mereka selama mereka melanjutkan pendidikan.

Beberapa sekolah yang disebutkan seperti yang ada di Kairatu, Masohi, Sanahu, dan Elpaputi menunjukkan bahwa ada keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah tersebut, yang hanya menyediakan pendidikan hingga tingkat SD dan SMP. Jika ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti SMA, mereka harus turun ke daerah yang lebih besar. Namun, perjalanan bolak-balik setiap hari ke kota besar (seperti Huku) sangat sulit, sehingga mereka memilih untuk tinggal sementara di rumah kenalan atau keluarga yang ada di kota tersebut. Setelah selesai sekolah atau pada saat liburan, mereka baru kembali ke kampung halaman mereka.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan bagaimana hubungan keluarga dan kenalan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah dengan fasilitas yang terbatas, serta pentingnya dukungan sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka.

¹⁵ Hasil wawancara Masyarakat Abio Bagaimana kehidupan budaya atau nilai adat budaya di sini digunakan untuk mengatasi masalah tersebut?

¹⁶ Hasil wawancara masyarakat Huku Kecil Apakah strategi tersebut dapat mengurangi masalah pendidikan saat ini?

Jejaring sosial, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai cara-cara orang tua, keluarga, atau masyarakat menggunakan hubungan sosial mereka baik melalui komunikasi langsung maupun melalui teknologi untuk membantu anak-anak mengakses pendidikan yang lebih baik, terutama di daerah-daerah seperti Abio dan Huku Kecil yang mungkin memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan. Berikut adalah beberapa interpretasi mengenai bagaimana jejaring sosial dapat membantu anak-anak di daerah tersebut mengakses pendidikan. Pemanfaatan Jejaring Sosial untuk Menghubungkan Anak dengan Sumber Pendidikan. Di daerah-daerah yang jauh atau memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan, jejaring sosial seringkali berperan sebagai penghubung antara anak-anak dan sumber daya pendidikan yang lebih luas. Misalnya, orang tua atau keluarga bisa memanfaatkan koneksi dengan kenalan yang tinggal di kota besar atau di tempat lain yang memiliki fasilitas pendidikan lebih baik. Melalui hubungan sosial ini, mereka bisa mencari informasi tentang sekolah yang lebih baik, beasiswa, atau peluang-peluang lain yang tidak tersedia di kampung mereka.

Jejaring sosial juga memungkinkan anak-anak untuk mengakses materi pembelajaran atau informasi penting terkait pendidikan yang tidak mereka dapatkan di sekolah lokal. Dengan memanfaatkan teknologi seperti internet dan platform media sosial (seperti Facebook, WhatsApp, atau grup belajar online), mereka dapat berbagi informasi, mendapatkan tips belajar, atau bahkan mengikuti kelas atau kursus daring yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar daerah mereka.

Dalam masyarakat tradisional atau di daerah-daerah dengan akses terbatas, peran keluarga dan komunitas sangat penting. Jejaring sosial dalam konteks ini juga mencakup dukungan moral dan finansial dari keluarga atau teman-teman yang lebih berpendidikan. Misalnya, keluarga yang tinggal di kota besar mungkin memberikan bantuan berupa tempat tinggal sementara, makanan, atau bahkan biaya sekolah kepada anak-anak yang melanjutkan pendidikan mereka di tempat tersebut. Komunitas juga bisa membantu dengan mencarikan peluang kerja sambil atau menyokong keberlangsungan pendidikan anak-anak di luar kampung.

Jejaring sosial di antara masyarakat yang memiliki kesamaan daerah atau latar belakang bisa mendorong solidaritas antar komunitas. Misalnya, grup-grup WhatsApp

atau media sosial lainnya bisa digunakan oleh orang tua atau warga untuk saling bertukar informasi tentang sekolah, peluang pendidikan, atau bahkan untuk membantu pengumpulan dana bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan di luar kampung. Melalui jejaring sosial, anak-anak bisa terhubung dengan orang-orang yang memiliki pengalaman sukses dalam pendidikan, baik itu alumni sekolah di luar kampung atau profesional yang berasal dari daerah mereka. Ini bisa menjadi sumber motivasi yang besar bagi anak-anak, karena mereka melihat contoh nyata dari orang-orang yang berhasil mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pendidikan mereka.

Jejaring sosial berperan penting dalam membantu anak-anak di daerah seperti Abio dan Huku Kecil mengakses pendidikan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan hubungan sosial dan teknologi, mereka bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan, menemukan peluang pendidikan yang lebih luas, dan menerima dukungan dari keluarga serta komunitas. Namun, untuk mengoptimalkan manfaatnya, dibutuhkan upaya untuk mengatasi kendala akses teknologi dan meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat setempat.

b. Dimensi Ekonomi

Krisis pendidikan sering kali berkaitan dengan masalah ekonomi yang berdampak pada ketersediaan sumber daya untuk pendidikan, seperti biaya sekolah, fasilitas, dan tenaga pengajar. Ketahanan ekonomi komunitas pasca krisis pendidikan tercermin dalam upaya mereka untuk mengatasi kekurangan dana dan mengakses bantuan eksternal. Misalnya, desa Abio dan Huku Kecil mencari dana dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk membangun kembali sekolah yang rusak, menyediakan beasiswa, mengembangkan program pelatihan bagi guru, membangun asrama dan penyediaan perpustakaan.

Abio dan Huku Kecil dapat teratasi dalam hal akses pendidikan melalui bantuan dari yayasan dan jaringan sosial mencakup beberapa aspek penting, mulai dari tantangan yang dihadapi oleh kedua komunitas, peran yayasan dalam meningkatkan akses pendidikan, hingga kontribusi jaringan sosial dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Dalam analisis ini, kita juga akan membahas bagaimana

kolaborasi antara yayasan dan jaringan sosial dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan pendidikan dan mempercepat perubahan sosial-ekonomi.

Masyarakat Abio: Jika masyarakat Abio berada di daerah terpencil atau pedesaan, mereka mungkin menghadapi masalah serius dalam hal akses pendidikan yang berkualitas. Misalnya, keterbatasan jumlah sekolah, fasilitas pendidikan yang buruk, atau kekurangan guru yang berkualitas. Banyak anak-anak di daerah seperti ini mungkin tidak dapat mengakses pendidikan tinggi karena biaya atau karena terhalang oleh kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai.

Masyarakat Huku Kecil: Masyarakat di Huku Kecil mungkin menghadapi masalah serupa, bahkan lebih parah, seperti minimnya sumber daya, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, atau bahkan tantangan sosial budaya yang bisa menghalangi akses pendidikan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Faktor ekonomi dan geografis sering kali menjadi penghalang utama untuk memperoleh pendidikan.

Yayasan atau lembaga swadaya masyarakat memiliki peran strategis dalam memperbaiki akses pendidikan di komunitas yang terpinggirkan. Beberapa cara yayasan dapat berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan di Abio dan Huku Kecil antara lain:

Penyediaan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan: Yayasan sering kali menyediakan beasiswa pendidikan untuk siswa berprestasi atau yang berasal dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini bisa mencakup biaya sekolah, buku, alat tulis, dan bahkan biaya transportasi jika sekolah berada jauh dari tempat tinggal mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi beban ekonomi yang dihadapi keluarga dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka.

Pembangunan Infrastruktur Pendidikan: Beberapa yayasan terlibat dalam pembangunan dan perbaikan sekolah, terutama di daerah terpencil. Ini bisa mencakup pembangunan ruang kelas, penyediaan fasilitas dasar seperti sanitasi, penyediaan alat belajar (komputer, buku, dll.), atau membangun sekolah baru di lokasi yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas pendidikan.

Pelatihan Guru dan Pengembangan Kurikulum: Yayasan dapat terlibat dalam program pelatihan untuk para guru di daerah yang kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas. Mereka juga dapat membantu mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal, atau menyediakan pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

Edukasi Non-Formal: Beberapa yayasan juga menyediakan program pendidikan non-formal, seperti kursus keterampilan, pelatihan kejuruan, atau program pendidikan orang dewasa. Ini memungkinkan anggota masyarakat yang sudah dewasa untuk memperoleh keterampilan yang dapat meningkatkan peluang ekonomi mereka meskipun mereka mungkin tidak bisa mengejar pendidikan formal.

Dengan network sosial yang digambarkan pada diatas dan dimensi sosial budaya, masyarakat Abio telah mengatasi masalah tersebut dengan adanya pihak ketiga yang memberikan kontribusi kepada pendidikan di Abio,

Yayasan tiga batang air itu dong bangun asrama untuk anak-anak sekolah Abio yang turun sekolah di pante. Lokasinya di negeri Sanahu dan asrama di Ambon juga untuk mahasiswa. Untuk pembangunan asrama itu yayasan tiga batang air yang urus semua sampai pada pembelian tanah dan pasang profil tank untuk air juga, asrama itu ada asrama putra dan putri. Asrama putri itu ada 6 kamar dan satu kamar itu isinya 2 siswa sedangkan asrama putra itu ada 12 dan satu kamar itu 3 orang. Baru yayasan tiga batang air juga kasih logistic lai di asrama yang sifatnya swadaya. Sedangkan untuk yayasan tangan harapan itu, dong kasih dua tenaga pengajar ke SD Kristen Abio. Katong cuma sediakan rumah kosong saja untuk dua pengajar dari yaaysan tangan harapan itu tinggal sedangkan untuk peralatan rumah, yayasan yang adakan sendiri. Kalau untuk makan minum katong masyarakat sering bawa makan ke dong dua lai. Yayasan ini masuk karena mereka juga ada memilik keturunan maluku terutama seram jadi dong sangat perhatin dengan katong punya kondisi¹⁷

¹⁷ Hasil Wawancara Pejabat Kepala Desa Abio “Apa bentuk bantuan yang dilakukan oleh pihak ke tiga pada pendidikan di sini?”

Gambar 5: Anak SMP, SMA dari Abio Sekolah di Sanahu



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian

Gambar di atas menunjukan bahwa dimana anak-anak di Abio Setelah selesai studi pada jejang dasar mereka melanjutkan jenjang menengah di desa lain, dan salah satunya di desa Sanahu. Kediman mereka ini merupakan Asrama yang di dirikan oleh yayasana tiga batang air yang beri nama Saka Hote. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan asrama dilakukan oleh Yayasan Tiga Batang Air, yang bertanggung jawab penuh mulai dari pengurusan pembelian tanah hingga pemasangan sistem penyediaan air, seperti profil tank untuk air. Terdapat dua jenis asrama, yaitu asrama putra dan asrama putri. Untuk asrama putri, tersedia 6 kamar, dan setiap kamar diisi oleh 2 siswa. Sementara itu, untuk asrama putra, terdapat 12 kamar, dengan masing-masing kamar diisi oleh 3 orang siswa. Ini menunjukkan bahwa kapasitas penghuni asrama putra lebih besar per kamar dibandingkan asrama putri, yang dapat memberikan gambaran tentang perbedaan jumlah penghuni dan fasilitas yang ada di kedua asrama tersebut.

Gambar 6 : Asrama Saka Hote Yayasan Tiga Batang Air



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian

Yayasan Tiga Batang Air telah melaksanakan proyek pembangunan asrama untuk mendukung pendidikan anak-anak di wilayah sekitar, khususnya bagi siswa SD Kristen Abio yang tinggal di daerah pesisir atau di luar kota. Asrama ini dibangun di Sanahu, sementara untuk mahasiswa, terdapat juga asrama di Ambon. Proyek ini meliputi pembelian tanah, pembangunan asrama, serta pemasangan fasilitas pendukung seperti profil tank untuk air bersih. Asrama yang dibangun terdiri dari dua bagian, yaitu asrama putradanasrama putri. Asrama putri memiliki 6 kamar, dengan masing-masing kamar dihuni oleh 2 siswa. Asrama putra memiliki 12 kamar, dan setiap kamar diisi oleh 3 siswa. Selain itu, Yayasan Tiga Batang Air juga memberikan logistik bagi penghuni asrama, yang diusahakan secara swadaya dari yayasan. Semua fasilitas dasar yang diperlukan oleh para penghuni asrama dipenuhi oleh yayasan ini untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar para siswa.

Sementara itu, Yayasan Tangan Harapan memiliki peran dalam mendukung pendidikan di SD Kristen Abio dengan mengirimkan dua tenaga pengajar. Yayasan ini memberikan bantuan berupa tenaga pengajar, sementara untuk tempat tinggal tenaga pengajar tersebut, masyarakat menyediakan rumah kosong untuk mereka. Meski demikian, peralatan rumah tangga lainnya untuk para pengajar ini disediakan oleh yayasan itu sendiri. Untuk kebutuhan makan dan minum, masyarakat setempat sering memberikan bantuan makanan secara sukarela kepada para pengajar dan penghuni asrama.

Keterkaitan dan Kepedulian Yayasan Tangan Harapan dan Tiga Batang Air sangat peduli terhadap kondisi masyarakat Abio dan Huku Kecil, terutama karena

mereka memiliki keturunan dari Maluku khususnya dari daerah Seram (Tiga Batang Air) kediam mereka Belanda. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka aktif memberikan bantuan, baik dalam bentuk tenaga pengajar maupun dukungan lainnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Secara keseluruhan, kedua yayasan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan dan fasilitas bagi anak-anak dan mahasiswa di daerah tersebut, serta mempererat hubungan antar komunitas dengan rasa kepedulian yang tinggi.

Dengan demikian, ketahanan ekonomi komunitas bisa dilihat dari bagaimana mereka mencoba memperbaiki kondisi ekonomi keluarga untuk mendukung pendidikan anak-anak, melalui jaringan sosial yang dikelola oleh aktor-aktor kunci di desa untuk menghairikan pihak ketiga seperti Yayasan Tanggapan Pengharapan dan Tiga Batang air. Kontribusi ini sangat berdampak untuk mengatasi ekonomi masyarakat untuk mendukung pendidikan anak. Karena fasilitas yang diberikan oleh yayasan sudah penuh.

c. Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran

Dimensi ini melekat pada sikap dan inovasi tenaga pendidik di daerah 3T dimana guru dapat melakukan cara pembelajaran yang adaptif untuk keberlangsungan pembelajaran selain itu juga guru dapat menerapkan system pembelajaran yang dapat sesuai dengan kondisi sekolah tersebut. Dalam konteks desa Abio dan Huku Kecil bahwa system pendidikan tidak dilakukan dengan maksimal;

SD di Abio itu masih pake kurikulum KTSP sedangkan kurikulum sudah berubah ke K13 lalu mau rubah dan penyesuaian itu cukup rumit, salah satunya soal bentuk laporan pendidikan, masuk di kurikulum merdeka belajar ini baru agak sedikit lumayan penyesuaiannya. Jadi katong skarang sdh sesuai kurikulumnya dengan kementerian punya putusan soal kurikulum merdeka belajar. Tapi keadaan pendidikan di Abio yang

seperti ini katong balom bisa pake kurikulum merdeka belajar karna kurikulum itu seng menjawan katong punya persoalan pendidikan¹⁸.

Pascakrisis pendidikan, ketahanan komunitas juga bisa dilihat dari upaya untuk membangun kembali sistem pendidikan yang rusak atau terganggu. Di Desa Abio dan Huku Kecil, ini bisa melibatkan upaya untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memotivasi anak-anak untuk kembali ke sekolah. Selain itu, masyarakat mungkin menginisiasi program-program pendidikan informal atau non-formal sebagai langkah sementara atau pelengkap bagi anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Sehingga tidak terpaku pada system pendidikan formal namun menerapkan pola pendidikan yang fleksibel sesuai kebutuhan pendidikan di desa Abio dan Huku Kecil.

Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses pendidikan, seperti pengajaran sukarela oleh warga atau pemuda setempat, bisa menjadi indikator ketahanan pendidikan. Ketahanan ini juga bisa dilihat dari keberlanjutan program-program pendidikan yang inklusif memungkinkan masyarakat tetap mengakses pendidikan meski dalam kondisi yang sulit. Konteks desa Abio adanya kontribus pihak ketiga untuk mefasilitas sekaligus menjawab kebutuhan krisis yang dialami; Ada kk. Ada dari yayasan tangan harapan dan yaaysan tiga batang air¹⁹ selain pihak ketiga ada juga partisipasi masyarakat dalam menunjang pendidikan.

Salah satu temuan utama dari masyarakat dalam menunjang pendidikan adalah peran penting yang dimainkan oleh masyarakat setempat dalam mendukung proses pendidikan di Desa Abio. Partisipasi aktif ini dapat terlihat melalui beberapa kegiatan, seperti pengajaran sukarela oleh warga atau pemuda setempat. Misalnya, ada beberapa pemuda yang memiliki keterampilan atau pengetahuan di bidang tertentu, seperti bahasa, matematika, atau keterampilan teknis lainnya, yang secara sukarela mengajarkan anak-

¹⁸ Hasil wawancara tenaga pendidik di SD Kristen Abio “pola pendidikan seperti apa yang sering diterapkan di sini?”

¹⁹ Hasil wawancara tenaga pendidik di SD Kristen Abio “Apakah selama ini ada pihak ke tiga membantu bapa/ibu untuk melihat masalah pendidikan?”

anak di luar jam sekolah formal. Ini merupakan indikasi bahwa masyarakat di Desa Abio memiliki komitmen yang kuat terhadap pendidikan anak-anak mereka, meskipun keterbatasan sumber daya yang ada.

Selain itu, para orang tua juga terlibat dalam menjaga kelangsungan pendidikan dengan membantu menyediakan bahan ajar, seperti buku dan alat tulis, serta mendukung anak-anak mereka untuk tetap bersekolah meski dalam kondisi ekonomi yang sulit. Partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Abio sadar akan pentingnya pendidikan dalam menciptakan peluang yang lebih baik di masa depan, meskipun mereka mungkin tidak memiliki akses penuh terhadap pendidikan formal yang berkualitas.

Ketahanan pendidikan di Desa Abio bisa dilihat dari kemampuan masyarakat untuk menjaga akses pendidikan meskipun menghadapi tantangan dan kondisi yang sulit. Ketahanan ini tidak hanya terletak pada kemampuan untuk terus mengakses pendidikan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan program pendidikan yang ada.

Di Desa Abio, meskipun terbatasnya fasilitas pendidikan dan keterbatasan dana, masyarakat berhasil menjaga pendidikan tetap berjalan melalui beberapa inisiatif lokal dan bantuan dari pihak luar. Salah satu faktor penting yang mendukung ketahanan ini adalah keberadaan yayasan yang memiliki komitmen untuk membantu memfasilitasi pendidikan, seperti Yayasan Tangan Harapan dan Yayasan Tiga Batang Air.

Ketahanan pendidikan di Desa Abio dapat dilihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan, keberlanjutan program pendidikan yang inklusif, serta kontribusi positif dari pihak ketiga seperti Yayasan Tangan Harapan dan Yayasan Tiga Batang Air. Masyarakat setempat, baik melalui pengajaran sukarela maupun partisipasi dalam kegiatan pendidikan lainnya, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar pendidikan tetap berjalan, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Keberlanjutan pendidikan yang inklusif memungkinkan lebih banyak anak-anak dan anggota masyarakat di Desa Abio untuk mengakses pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Namun ada perbedaan kontribusi kedua yayasan tersebut pada desa Huku Kecil dan Abio, Kedua Yayasan ini telah banyak kontribusi bagi desa Abio sementara untuk desa Huku Kecil hanya Yayasan Tangan Harapan melalui gereja setelah di konfirmasi Huku Kecil juga berusaha membangun kerja sama dengan Yayasan Tiga Batang Air untuk dapat memberi bantu seperti desa Abio.

Betul ada Yayasan Tangan Harapan dan katong juga mau berproses dengan Yayasan Batang Air katong berkaca dari Abio pendidikan sangat terbantu²⁰

Interpretasi dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keberadaan Yayasan Tangan Harapan dan Yayasan Batang Air memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pendidikan di Desa Abio. Kepala Desa Huku Kecil dan masyarakat setempat menyadari bahwa melalui bantuan dari kedua yayasan ini, pendidikan di desa mereka menjadi lebih terbantu, terutama dalam hal akses dan kualitas. Yayasan Tangan Harapan, yang menyediakan beasiswa dan pelatihan untuk guru, serta Yayasan Batang Air yang berfokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan, telah memberikan kontribusi yang besar untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pendidikan di daerah tersebut.

Kelapa Desa Huku Kecil dan masyarakat setempat juga menunjukkan keinginan untuk terus berproses dan berkolaborasi dengan Yayasan Batang Air, dengan melihat contoh keberhasilan yang ada di Abio. Mereka berharap dapat mengadaptasi model dan pendekatan serupa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di komunitas mereka. Hal ini menandakan adanya optimisme dan kesadaran kolektif bahwa dengan adanya dukungan dari pihak luar, termasuk yayasan, proses pendidikan di desa dapat berkembang lebih baik dan lebih inklusif. Dengan demikian, wawancara ini mencerminkan harapan masyarakat untuk memperbaiki akses pendidikan dan mendorong perubahan positif melalui kolaborasi yang lebih luas.

²⁰ Hasil Wawancara Kepala Desa Huku Kecil “Apakah ada pihak ketiga dalam membantu pendidik di Huku?”

d. Ketahanan Psikososial

Krisis pendidikan sering meninggalkan dampak psikologis, baik bagi siswa, orang tua, maupun tenaga pendidik. Ketahanan psikososial komunitas pasca krisis tercermin dalam kemampuan masyarakat untuk saling mendukung secara emosional dan psikologis. Program-program konseling atau pendampingan sosial yang diinisiasi oleh komunitas atau pemerintah lokal dapat membantu individu dan keluarga untuk pulih dari dampak krisis pendidikan, baik dari segi mental maupun motivasi untuk melanjutkan pendidikan.

Ketahanan psikososial masyarakat Abio dan Huku Kecil pasca krisis pendidikan yang disebabkan oleh faktor geografis dan ketidakterediaan pelayanan dasar menunjukkan sejauh mana komunitas ini dapat bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali dari tantangan besar yang mereka hadapi, baik dalam aspek pendidikan maupun kondisi sosial lainnya. Krisis pendidikan yang terjadi di dua desa ini, baik yang disebabkan oleh keterbatasan akses geografis maupun kurangnya fasilitas dasar seperti sekolah, fasilitas kesehatan, air bersih, dan infrastruktur lainnya, mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial masyarakat.

Krisis pendidikan yang disebabkan oleh lokasi geografis yang terpencil dan minimnya akses terhadap layanan dasar seperti sekolah yang memadai, tenaga pengajar yang terlatih, dan fasilitas pendidikan lainnya, memiliki dampak langsung terhadap ketahanan psikososial masyarakat di Abio dan Huku Kecil. Ketahanan psikososial mengacu pada kemampuan individu dan komunitas untuk menghadapi, mengatasi, dan pulih dari stres serta trauma yang disebabkan oleh kesulitan hidup, baik dalam bentuk bencana alam, krisis ekonomi, atau krisis sosial.

Pertama, Stres Sosial dan Psikologis, ketika anak-anak tidak dapat mengakses pendidikan yang layak, hal ini mempengaruhi tidak hanya masa depan mereka, tetapi juga kesejahteraan emosional orang tua dan masyarakat. Orang tua di kedua desa ini mungkin merasa cemas tentang masa depan anak-anak mereka, karena pendidikan adalah salah satu kunci untuk perbaikan ekonomi dan sosial. Ketidakmampuan untuk memberi anak mereka akses pendidikan yang memadai bisa memicu perasaan frustrasi, kecewa, atau bahkan putus asa.

Kedua, Tantangan Sosial dan Keterasingan, selain faktor ekonomi, ada juga dampak psikososial dari rasa keterasingan akibat lokasi geografis yang terisolasi. Masyarakat Abio dan Huku Kecil yang jauh dari pusat-pusat pelayanan atau kota besar sering kali merasa terisolasi, baik dalam hal informasi maupun dalam hal akses ke layanan sosial. Ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan yang lebih luas menyebabkan perasaan terpinggirkan dan kehilangan harapan untuk perkembangan sosial yang lebih baik.

Meskipun demikian, masyarakat di kedua desa ini menunjukkan ketahanan psikososial yang luar biasa dalam menghadapi krisis pendidikan dan ketidakterediaan pelayanan dasar. Beberapa indikator ketahanan psikososial ini dapat terlihat melalui cara mereka bertahan dan beradaptasi dalam situasi sulit, seperti: Petama, **Solidaritas Sosial dan Gotong Royong**: Di tengah keterbatasan, solidaritas sosial dalam bentuk gotong royong menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengatasi krisis pendidikan. Banyak warga yang bergotong royong untuk membantu anak-anak belajar, meski tanpa dukungan formal dari lembaga pendidikan. Pemuda-pemuda setempat sering kali mengambil peran sebagai pengajar sukarela, mengajarkan keterampilan atau pengetahuan dasar kepada anak-anak dan remaja yang kesulitan mengakses sekolah. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan memperbaiki kesejahteraan emosional masyarakat. Keterlibatan dalam kegiatan kolektif ini memberikan rasa memiliki dan saling mendukung, yang sangat penting untuk ketahanan psikososial.

Kedua, **Pemulihan Melalui Pendidikan Non-Formal**: Di luar pendidikan formal, masyarakat mengembangkan berbagai bentuk pendidikan non-formal. Misalnya, kelompok belajar yang diorganisir oleh warga atau pemuda setempat yang memberikan pelajaran kepada anak-anak dan remaja. Pendidikan semacam ini, meskipun sederhana, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk terus belajar dan memiliki harapan, yang sangat penting untuk menjaga semangat dan ketahanan psikologis mereka.

Ketiga, **Pemanfaatan Sumber Daya Lokal**: Masyarakat juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memanfaatkan sumber daya lokal yang ada untuk meningkatkan ketahanan mereka. Mereka mengandalkan pengetahuan tradisional, seperti keterampilan bertani, kerajinan tangan, atau keahlian lainnya yang dimiliki oleh anggota

masyarakat untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan mereka sumber penghidupan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup. Keberhasilan dalam mengelola sumber daya lokal menjadi bentuk ketahanan psikososial yang memperkuat ikatan antarwarga desa.

Di sisi lain, meskipun masyarakat Abio dan Huku Kecil menunjukkan ketahanan yang luar biasa, dukungan eksternal sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengatasi dampak jangka panjang dari krisis pendidikan dan kurangnya pelayanan dasar. Beberapa langkah dukungan yang dapat meningkatkan ketahanan psikososial mereka adalah: Pertama, Intervensi Psikososial, dukungan berupa konseling atau program kesehatan mental untuk membantu masyarakat mengatasi perasaan stres, frustrasi, atau kecemasan terkait krisis pendidikan dan kondisi sosial mereka sangat dibutuhkan. Program-program ini bisa melibatkan tenaga kesehatan mental dari luar atau dari yayasan lokal yang peduli dengan kesehatan psikologis masyarakat.

Kedua, Pendidikan Inklusif dan Berkelanjutan, memberikan akses pendidikan yang lebih luas, baik melalui bantuan dari yayasan atau sektor swasta, bisa meningkatkan rasa optimisme dan harapan di kalangan masyarakat. Program pendidikan yang inklusif, seperti kelas keterampilan atau pelatihan vokasi, dapat memberikan dampak positif dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Ketiga, Infrastruktur dan Layanan Dasar, penyediaan layanan dasar yang lebih baik, seperti fasilitas kesehatan, air bersih, dan transportasi yang memadai, akan sangat mendukung ketahanan sosial dan psikologis masyarakat. Ketika masyarakat merasa kebutuhan dasar mereka dipenuhi, mereka akan lebih mudah mengatasi tantangan psikologis dan emosional.

Kehadiran Yayasan Tangan Harapan dan Yayasan Batang Air, misalnya, merupakan contoh konkret dari peran pihak ketiga dalam membantu membangun ketahanan psikososial masyarakat. Yayasan-yayasan ini tidak hanya memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga berperan dalam pemulihan sosial dan psikologis dengan memberikan akses pada berbagai program dukungan, pelatihan keterampilan, dan sumber daya lainnya.

Dengan adanya bantuan eksternal ini, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap pendidikan yang lebih baik, tetapi juga merasa didukung dalam perjuangan

mereka untuk keluar dari krisis. Kehadiran yayasan tersebut memberikan rasa harapan dan kepercayaan bahwa meskipun mereka berada di daerah yang terisolasi dan memiliki banyak keterbatasan, mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup.

Ketahanan psikososial masyarakat Abio dan Huku Kecil pasca krisis pendidikan sangat dipengaruhi oleh solidaritas sosial, upaya mandiri masyarakat untuk menciptakan ruang pendidikan non-formal, serta dukungan eksternal dari yayasan dan lembaga lain. Meskipun tantangan besar dihadapi akibat kondisi geografis yang terisolasi dan kurangnya pelayanan dasar, masyarakat mampu menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam mengatasi stres sosial dan psikologis. Melalui gotong royong, penggunaan sumber daya lokal, dan peningkatan pendidikan non-formal, mereka mampu bertahan. Namun, untuk memperkuat ketahanan ini lebih jauh, dukungan tambahan dari pihak ketiga yang dapat menyediakan infrastruktur, layanan dasar, dan dukungan psikososial sangat dibutuhkan.

e. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, memiliki peran penting dalam membangun ketahanan komunitas pasca krisis pendidikan. Desa Abio dan Huku Kecil mungkin membutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk program rehabilitasi sekolah, distribusi buku dan alat tulis, pelatihan bagi guru, serta penyediaan beasiswa atau insentif untuk siswa dan orang tua. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan, agar intervensi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Krisis pendidikan yang dialami oleh masyarakat di Desa Abio dan Huku Kecil akibat faktor geografis dan tidak tersedianya pelayanan dasar yang memadai memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga terkait. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam mengatasi dampak negatif dari ketidakterediaan akses pendidikan yang berkualitas, serta memberikan solusi yang berkelanjutan agar masyarakat dapat bangkit dan mengatasi krisis tersebut. Berikut adalah interpretasi mengenai peran pemerintah dan lembaga terkait pasca krisis pendidikan yang terjadi di Desa Abio dan Huku Kecil:

a. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Pendidikan

Penyediaan infrastruktur pendidikan dan layanan dasar salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis pendidikan di Abio dan Huku Kecil adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan yang memadai dan minimnya layanan dasar seperti transportasi, sanitasi, dan fasilitas kesehatan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa infrastruktur pendidikan tersedia dengan baik di setiap daerah, termasuk daerah terpencil.

Pembangunan Sekolah dan Fasilitas Pendidikan Pemerintah perlu segera merespons dengan membangun atau merenovasi fasilitas pendidikan di desa-desa terpencil. Sekolah-sekolah yang ada harus diperbaiki, dan jika diperlukan, dibangun sekolah baru di lokasi yang lebih strategis untuk memudahkan akses anak-anak di Abio dan Huku Kecil. Ini termasuk memastikan adanya ruang kelas yang layak, fasilitas sanitasi yang memadai, dan alat bantu belajar yang memadai.

Penyediaan Sarana Transportasi selain pembangunan sekolah, pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana anak-anak di daerah terisolasi dapat menjangkau sekolah. Penyediaan transportasi umum atau bantuan kendaraan untuk siswa yang tinggal jauh dari sekolah sangat penting. Hal ini akan mengurangi hambatan geografis dan mempermudah akses mereka ke pendidikan.

Layanan Kesehatan dan Sanitasi ketersediaan layanan kesehatan dasar dan sanitasi yang baik adalah bagian integral dari ketahanan pendidikan. Tanpa layanan kesehatan yang memadai, anak-anak akan lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan dan sanitasi diperbaiki dan mudah diakses oleh masyarakat.

b. Penguatan Program Pendidikan yang Inklusif dan Terjangkau

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil seperti Abio dan Huku Kecil. Ini termasuk kebijakan tentang pendidikan

dasar gratis, bantuan beasiswa, dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang lebih dewasa.

Pendidikan Gratis dan subsidi program pendidikan gratis atau dengan biaya terjangkau untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang terhambat untuk bersekolah karena masalah biaya. Program bantuan seperti beasiswa untuk siswa berprestasi atau bantuan biaya transportasi juga bisa sangat membantu.

Kurikulum yang Relevan dan Berkelanjutan Pemerintah juga harus memastikan bahwa kurikulum pendidikan yang diajarkan relevan dengan kebutuhan lokal, termasuk pengetahuan tentang pertanian, kerajinan tangan, atau keterampilan teknis lainnya yang dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing anak-anak di desa.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan pendidikan, dan organisasi sosial lainnya memainkan peran penting dalam membantu pemerintah, terutama dalam situasi krisis pendidikan yang kompleks. Di Desa Abio dan Huku Kecil, lembaga-lembaga ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan. Kolaborasi dengan Yayasan dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO). Lembaga seperti Yayasan Tangan Harapan dan Yayasan Tiga Batang Air, yang sudah ada di daerah tersebut, dapat terus berperan dalam memberikan dukungan kepada masyarakat. Mereka dapat menyediakan bantuan pendidikan berupa buku, alat tulis, atau beasiswa bagi anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, mereka juga dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan atau kursus yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada ketahanan pendidikan.

Pertama, penyuluhan dan edukasi masyarakat yayasan dan NGO dapat mengadakan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Program ini juga bisa berfokus pada pembelajaran keterampilan yang dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Kedua, Pengembangan Infrastruktur Secara Mandiri. Beberapa lembaga sosial dapat berperan dalam

membangun infrastruktur pendidikan tambahan, seperti ruang belajar komunitas, atau menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di desa. Ini sangat penting mengingat kekurangan guru terlatih di daerah terpencil. Ketiga, Penggalangan Dana dan Mobilisasi Sumber Daya.

Lembaga terkait seperti yayasan pendidikan dan komunitas sosial juga dapat berperan dalam penggalangan dana untuk mendukung pendidikan di daerah yang kurang berkembang. Dana ini bisa digunakan untuk membangun sekolah, menyediakan beasiswa, atau mengadakan kegiatan pembelajaran non-formal bagi anak-anak yang tidak bisa mengakses sekolah formal. Crowdfunding atau kolaborasi dengan donor internasional bisa menjadi salah satu strategi untuk memastikan kelangsungan program-program pendidikan di daerah-daerah terpencil. Keempat, program Pendidikan Non-Formal. Lembaga terkait juga dapat memfasilitasi pendidikan non-formal yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang sulit mengakses pendidikan formal. Program ini bisa berbentuk kelas keterampilan untuk orang dewasa atau pendidikan tambahan untuk anak-anak. Kegiatan-kegiatan ini akan memberikan masyarakat kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang dapat meningkatkan ekonomi mereka sekaligus menjaga semangat pendidikan di tengah keterbatasan.

c. Peran Pemerintah Daerah dalam Respons Cepat dan Responsif

Selain peran pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi krisis pendidikan. Sebagai pihak yang lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons kebutuhan mendesak dan mengimplementasikan kebijakan yang relevan untuk mengatasi hambatan geografis dan ketidaktersediaan layanan dasar.

- a. Pemberdayaan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana untuk pembangunan pendidikan dan layanan dasar dialokasikan dengan tepat. Ini termasuk memperbaiki atau membangun fasilitas pendidikan yang ada, serta menyediakan anggaran untuk transportasi dan kesehatan yang akan mendukung pendidikan anak-anak di

daerah terpencil. Pemerintah daerah juga bisa bekerja sama dengan yayasan lokal untuk mempercepat pemulihan pasca krisis pendidikan.

- b. Kolaborasi Antar Instansi. Kolaborasi antara instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan sektor swasta (termasuk perusahaan yang memiliki program CSR) sangat penting. Pemerintah dapat memfasilitasi kerjasama ini dengan memberikan insentif atau kemudahan regulasi bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam pemulihan sektor pendidikan di daerah yang terdampak krisis.

Tantangan yang dihadapi pemerintah dan lembaga terkait pertama, keterbatasan Anggaran. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran pemerintah yang tidak cukup untuk menangani seluruh kebutuhan pembangunan di daerah terpencil, termasuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, kerjasama dengan lembaga swasta dan organisasi donor internasional sangat diperlukan. Kedua, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai dan kekurangan tenaga pengajar yang terlatih di daerah terpencil juga menjadi tantangan besar. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam pelatihan guru lokal agar mereka memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mengajar.

Peran pemerintah dan lembaga terkait sangat krusial dalam mengatasi krisis pendidikan yang dialami oleh masyarakat Abio dan Huku Kecil. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus segera memastikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, serta menyediakan layanan dasar yang memadai untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan. Lembaga terkait, seperti yayasan dan NGO, juga berperan penting dalam memberikan dukungan langsung kepada masyarakat melalui bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta akan mempercepat pemulihan krisis pendidikan dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

f. Kolaborasi Antar-Komunitas

Ketahanan komunitas juga sering kali dibangun melalui kolaborasi dengan komunitas lain. Desa Abio dan Huku Kecil bisa saling bertukar pengalaman dengan desa lain yang menghadapi situasi serupa. Misalnya, desa yang lebih maju dalam hal pendidikan bisa

memberikan dukungan kepada desa yang lebih terisolasi melalui program sister village, di mana mereka berbagi sumber daya, pengetahuan, dan strategi untuk mengatasi masalah pendidikan.

Interpretasi ketahanan komunitas pasca krisis pendidikan di Desa Abio dan Huku Kecil mencakup berbagai aspek yang saling terkait, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan itu sendiri. Ketahanan ini bergantung pada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan penguatan sektor pendidikan, serta memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anggota komunitas. Pasca-krisis, penting bagi komunitas untuk saling mendukung dalam aspek sosial dan ekonomi. Kolaborasi antar-komunitas akan menciptakan jaringan solidaritas yang memperkuat akses pendidikan, dengan cara: Saling berbagi informasi, komunitas-komunitas yang lebih besar atau lebih maju dalam pemulihan bisa berbagi informasi mengenai cara-cara efektif untuk melanjutkan pendidikan, mendapatkan bantuan, atau mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Program adopsi sekolah atau adopsi siswa komunitas dapat melakukan program adopsi antara sekolah-sekolah di daerah yang lebih maju dengan yang terdampak krisis. Ini bisa berupa penyediaan bantuan pendidikan, pakaian sekolah, hingga mentransfer pengetahuan mengenai pengelolaan sekolah yang lebih baik.

Kolaborasi antar-komunitas pasca krisis di daerah seperti Abio dan Huku Kecil sangat penting dalam memastikan bahwa pendidikan tetap berjalan meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Melalui penguatan jaringan solidaritas, pemberdayaan sumber daya lokal, dukungan psikososial, serta pemanfaatan sumber daya eksternal, akses pendidikan dapat dipulihkan dengan lebih cepat dan efektif. Kolaborasi ini tidak hanya membantu anak-anak untuk kembali ke bangku sekolah, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Kolaborasi antar-komunitas pasca-krisis untuk meningkatkan akses pendidikan di Desa Abio dan Desa Huku Kecil dapat menjadi upaya yang sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dan masyarakat yang terdampak krisis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Desa-desa seperti Abio dan Huku Kecil menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal aksesibilitas, infrastruktur, dan

sumber daya setelah mengalami krisis, Oleh karena itu membangun kolaborasi yang kuat antar-komunitas dan pihak terkait akan menjadi langkah kunci untuk mempercepat pemulihan dan memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas.

Berikut adalah beberapa pendekatan kolaborasi antar-komunitas pasca-krisis yang bisa diterapkan untuk meningkatkan akses pendidikan di Desa Abio dan Huku Kecil:

1. Kolaborasi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan LSM

Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah desa harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan adanya alokasi dana dan kebijakan yang mendukung pemulihan pendidikan. Pemerintah desa juga bisa menjadi penghubung untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan di tingkat lokal didengarkan dan dipenuhi. Rehabilitasi infrastruktur, jika fasilitas pendidikan di kedua desa rusak atau tidak memadai pasca-krisis, pemerintah dapat bekerjasama dengan LSM dan sektor swasta untuk membangun kembali atau merenovasi sekolah. Program Bantuan Pendidikan. Pemerintah desa dan kabupaten bisa menyelenggarakan program bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi anak-anak yang berasal dari keluarga terdampak atau yang kesulitan membayar biaya pendidikan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan dukungan di bidang pembangunan kapasitas guru, pendidikan darurat, dan pengadaan alat-alat pendidikan. LSM juga dapat membantu dalam pendampingan psikososial bagi anak-anak dan keluarga yang terdampak krisis. LSM yang berfokus pada pendidikan dan pemulihan pasca-bencana seringkali memiliki sumber daya atau relawan yang dapat dilibatkan dalam upaya pemulihan ini. Pemulihan Infrastruktur Pendidikan, Sekolah Darurat, sekolah permanen rusak atau tidak bisa digunakan setelah krisis, kolaborasi antar-komunitas bisa membentuk sekolah darurat yang dapat dibangun sementara menggunakan bahan-bahan lokal atau bahan yang mudah didapatkan, seperti tenda, bahan kayu, atau bangunan semi-permanen. Ini memungkinkan anak-anak tetap dapat belajar meskipun fasilitas formal belum tersedia. Pengadaan Sarana Pembelajaran, Komunitas, melalui kerjasama dengan pemerintah atau LSM, bisa mengadakan buku pelajaran, alat tulis, dan peralatan lainnya untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap

berlangsung. Jika ada kendala dalam akses ke buku pelajaran, bisa diusahakan penyediaan materi pembelajaran digital atau radio edukasi untuk anak-anak.

Pelatihan Guru dan Relawan Pendidikan Setelah krisis, sering kali ada kekurangan guru atau tenaga pendidik yang berkompeten. Kolaborasi antar-komunitas bisa melibatkan pelatihan guru lokal atau relawan pendidikan untuk memberikan pengajaran sementara. Pelatihan ini bisa meliputi metode pengajaran yang efektif dalam situasi darurat serta cara mengatasi trauma psikologis yang dialami oleh anak-anak. Relawan Pendidikan komunitas juga dapat mengorganisir pelatihan relawanyang terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat, atau pemuda yang bisa membantu dalam memberikan pendampingan pendidikan secara informal kepada anak-anak yang belum bisa mengakses pendidikan formal.

3. Refeksi Strategi dalam Membangun Ketahanan Komunitas Pasca Krisis

Strategi dalam membangun ketahanan komunitas pasca krisis Ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh komunitas untuk membangun ketahanan setelah krisis pendidikan: *Pertama*, Peningkatan Keterlibatan Komunitas: Komunitas yang terlibat langsung dalam pemulihan pendidikan akan lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan pendidikan. Ini bisa dilakukan melalui pengorganisasian kelompok orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya untuk menyokong proses pendidikan. *Kedua*, Infrastruktur Pendidikan yang Fleksibel, membangun atau memperbaiki infrastruktur pendidikan yang dapat digunakan dalam berbagai situasi, baik dalam kondisi normal maupun darurat. Misalnya, penggunaan ruang kelas yang multifungsi atau pendirian sekolah darurat untuk merespons situasi krisis. *Ketiga* Pendidikan Berbasis Teknologi dan Jarak Jauh: Pemanfaatan teknologi untuk memastikan kelanjutan pendidikan, seperti pembelajaran daring, materi pembelajaran digital, atau bahkan radio dan televisi untuk menjangkau siswa di daerah terpencil. *Keempat* Pelatihan untuk Guru dan Pengelola Pendidikan: Guru dan pengelola pendidikan perlu dilatih untuk menangani situasi krisis, memahami pendekatan-pendekatan baru dalam pengajaran, serta memimpin dalam pemulihan pasca-krisis. *Kelima* Mendukung Kesejahteraan Psikososial, Krisis sering meninggalkan dampak psikososial pada siswa dan komunitas secara umum. Oleh karena

itu, penting untuk menyertakan program pemulihan mental dan dukungan psikologis dalam membangun ketahanan komunitas pasca krisis pendidikan.

Peran Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah Pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM) juga memainkan peran penting dalam ketahanan komunitas pasca krisis pendidikan. Mereka bisa membantu dalam hal. Penyediaan Bantuan Dana dan Sumber Daya Pemerintah perlu menyediakan dana untuk pemulihan pendidikan, sementara LSM dapat berperan dalam menyediakan dukungan teknis dan sumber daya untuk komunitas yang lebih kecil atau terpencil.

Tantangan Ketahanan Komunitas Pasca Krisis Pendidikan Meskipun ada banyak strategi dan upaya untuk membangun ketahanan, terdapat beberapa tantangan yang sering muncul, seperti Keterbatasan Sumber Daya. Banyak komunitas, terutama di daerah terpencil, mungkin tidak memiliki cukup sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk mendukung pemulihan pendidikan yang efektif. Ketidaksetaraan Akses, Beberapa kelompok dalam komunitas mungkin lebih terpinggirkan, seperti anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, atau kelompok etnis yang menghadapi kesulitan lebih besar untuk mengakses pendidikan.

Ketahanan komunitas pasca krisis pendidikan adalah suatu proses yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak dan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi yang ada. Meskipun tantangan besar dapat muncul, dengan adanya komitmen untuk mengatasi hambatan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pendidikan, komunitas dapat pulih dan bahkan berkembang lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Pendidikan berjalan beriringan dengan struktur dan kebudayaan sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, pendidikan senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan yang akan dituju oleh masyarakat. Bryson mengatakan bahwa, *“environment outside the organization in order to identify the opportunities and challenges the organization faces”*, menurutnya lingkungan luar organisasi²¹ dalam hal ini lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan organisasi, idealnya dalam

²¹ 1 John M. Bryson, *Strategic Planning, for Public and Nonprofit Organization* (San Fransisco: Jossey Bass, 2001) h. 159.

hubungan dengan yang berkepentingan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan pendidikan.

Menurut para ahli sosiologi pendidikan, terdapat relasi resiprokal (timbang balik) antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini akan berlangsung terus dalam penyelenggaraan pendidikan yang merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat yang kompleks. Demikian juga sebaliknya, kondisi masyarakat, baik dalam aspek kemajuan, peradaban, kebudayaan, sosial, politik, dan sejenis tercermin dalam kondisi dunia pendidikannya. Oleh karena itu, majunya dunia pendidikan juga dapat menjadi cermin terhadap kondisi masyarakatnya. Ahmad menjelaskan, bahwa sistem pendidikan yang dicanangkan dalam sekolah itu berkaitan erat hubungannya dengan berbagai budaya, sistem ekonomi, politik, dan lain sebagainya dalam rangka membina dan mengembangkan masyarakat²² Oleh karena itu pola dan bentuk pendidikan yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain karena adanya perbedaan bentuk atau sistem budaya dari masyarakat, karena adanya perbedaan tujuan membentuk anggota masyarakat yang berguna bagi masyarakatnya, bahwa pendidikan itu sebenarnya merupakan bagian dari budaya umum suatu tempat. Saripudin mengatakan, proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan.³ Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, sosial, intelektual, dan nilai-nilai. Lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia yang merupakan tempat dan sekaligus memberikan dukungan dan juga bisa menjadi hambatan bagi berlangsungnya proses penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan memiliki empat pilar utama, yaitu belajar untuk belajar (*learning how to learn*), belajar untuk mengetahui (*learning how to know*), belajar untuk menjadi (*learning how to be*), dan belajar untuk hidup dengan orang lain (*learning how to live together*), akan menciptakan masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan. Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T merupakan langkah penting untuk mengokohkan sistem pertahanan nasional di wilayah tersebut melalui pendidikan dan budaya. Peningkatan akses pendidikan di daerah 3T akan menghapus stigma kesenjangan politik nasional mengenai

²² Nazii Shaleh Ahmad, Pendidikan dan Masyarakat (Yogyakarta: Sabda, 2001), h. 63

peningkatan sumber daya dan infrastruktur, juga menjadikan warga di daerah 3T merasa menjadi bagian dari negara Indonesia.

Sebagian dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menghadapi persoalan dari segi letak geografis yang tidak menguntungkan, bencana alam, serta masalah sosial ekonomi dan kultur. Pendidikan masih jauh dari yang diharapkan baik dari ketersediaan buku, kualitas guru, proses belajar-mengajar, absensi guru, dan sebagainya. Itulah fenomena pendidikan yang terjadi di daerah 3T. Persoalan pendidikan hanya dapat diatasi jika kita juga fokus mengatasi persoalan utama, bagaimana manajemen pendidikan mampu memenuhi standar pelayanan minimum sesuai yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam perkembangannya, penyelenggaraan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), menghadapi kompleksitas tersendiri mulai dari bagaimana menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas, berlangsungnya pendidikan dengan kualitas yang terjamin, sampai pada pemerataan akses pendidikan. Kendatipun kita tidak membeda-bedakan, namun dalam kenyataan penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T akan selalu tertinggal. Mendatangkan guru ke daerah 3T tidak

4. Tantangan Pendidikan Berbasis Kawasan dan Komunitas

Pendidikan berbasis kawasan dan komunitas (*community-based education*) merupakan pendekatan yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat setempat dalam proses pembelajaran. Model ini menghubungkan pendidikan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat, serta melibatkan komunitas dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, pendekatan ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Berikut beberapa tantangan utama dalam pendidikan berbasis kawasan dan komunitas:

1. Keterbatasan Sumber Daya : Masyarakat Abio dan Huku Kecil, yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya untuk mendukung pendidikan berkualitas. Ini mencakup kekurangan fasilitas pendidikan, keterbatasan materi pembelajaran, dan kurangnya pelatihan bagi pengajar. Pendidikan berbasis komunitas seringkali memerlukan dukungan yang lebih intensif dalam bentuk dana, pelatihan, dan teknologi. Tanpa sumber daya yang memadai, kualitas pendidikan bisa terhambat. Selain itu juga jaringan sosial dapat membantu system pendidikan yang feksibel.
2. Ketergantungan pada Kapasitas Lokal : Keberhasilan model pendidikan berbasis komunitas sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen masyarakat setempat. Jika komunitas tersebut tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup terlatih atau kurang berpartisipasi, maka implementasi program pendidikan bisa terhambat. Komunitas mungkin kurang memiliki pemahaman atau keterampilan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif, yang memerlukan intervensi luar atau pelatihan tambahan.
3. Diversitas Kebutuhan dan Kepentingan : Setiap kawasan atau komunitas memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda-beda, tergantung pada budaya, nilai, ekonomi, dan kondisi sosial mereka. Menyusun kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan standar pendidikan yang lebih luas bisa sangat menantang. Menyeimbangkan kebutuhan masyarakat lokal dengan tuntutan kurikulum nasional atau standar pendidikan nasional bisa menjadi dilema, terutama jika ada perbedaan yang signifikan antara keduanya.

4. Keterbatasan Akses ke Teknologi dan Informasi : Di Abio dan Huku Kecil, yang terisolasi atau kurang berkembang, akses terhadap teknologi dan informasi masih sangat terbatas. Hal ini dapat menghambat penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan membatasi kesempatan bagi siswa untuk mengakses materi pembelajaran secara global. Kesenjangan digital ini juga membuat sulitnya implementasi pendidikan berbasis teknologi, yang sekarang menjadi salah satu elemen penting dalam pendidikan modern.
5. Perbedaan Antara Pendidikan Formal dan Informal : Pendidikan berbasis kawasan dan komunitas sering melibatkan bentuk-bentuk pembelajaran informal yang bisa jadi tidak diakui dalam sistem pendidikan formal. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan antara pelajar yang mendapatkan pendidikan berbasis komunitas dan mereka yang mengikuti pendidikan formal. Di beberapa kasus, lulusan dari program pendidikan berbasis komunitas mungkin kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mendapatkan pengakuan di pasar kerja.
6. Tantangan dalam Kolaborasi antara Pemerintah dan Komunitas : Keberhasilan pendidikan berbasis komunitas memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini bisa sulit terjalin dengan baik, terutama jika ada ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan komunitas setempat. Konflik antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah atau ketidaksesuaian prioritas antara lembaga pendidikan dan masyarakat bisa menjadi hambatan serius.
7. Ketahanan terhadap Perubahan : Pendidikan berbasis komunitas sering kali berakar pada tradisi dan nilai-nilai lokal. Meskipun ini memberikan keunggulan dalam menciptakan relevansi lokal, perubahan atau inovasi dalam pendekatan pendidikan bisa ditentang jika ada resistensi budaya terhadap pembaruan. Pendekatan pendidikan yang terlalu terikat pada tradisi atau tidak cukup fleksibel dapat menghambat perkembangan sistem pendidikan yang lebih modern atau inklusif.
8. Pengukuran dan Evaluasi yang Menantang : Menilai keberhasilan pendidikan berbasis komunitas bisa sangat sulit dilakukan, terutama karena ada banyak variabel yang terlibat, termasuk partisipasi masyarakat, kondisi lokal, dan perkembangan jangka panjang yang sulit diukur secara kuantitatif. Kurangnya sistem evaluasi yang

komprehensif dan objektif dapat menyulitkan pengukuran dampak jangka panjang dari pendidikan berbasis komunitas, serta memperburuk kesulitan dalam menentukan intervensi yang tepat.

9. Isu Sosial dan Ekonomi : Kondisi sosial dan ekonomi yang kurang mendukung, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, atau konflik sosial, dapat menghambat efektivitas pendidikan berbasis komunitas. Misalnya, anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan anak atau yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Faktor-faktor ini menambah lapisan kompleksitas dalam merancang dan mengimplementasikan program pendidikan yang inklusif dan merata.
10. Penerimaan dan Keterlibatan Orang Tua : Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Namun, tidak semua orang tua mungkin mengerti atau mendukung konsep pendidikan berbasis komunitas. Beberapa mungkin lebih memilih pendidikan formal yang terstruktur atau merasa tidak ada cukup nilai dalam pendekatan pendidikan berbasis komunitas. Keterlibatan orang tua dan keluarga dalam pendidikan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang, namun bisa sulit untuk mendapatkan dukungan yang konsisten dari semua lapisan masyarakat.

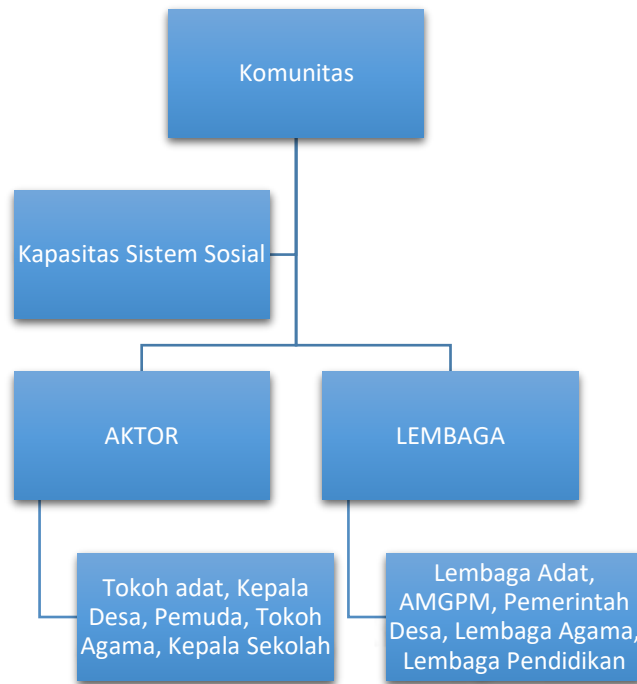
Meskipun pendidikan berbasis kawasan dan komunitas menawarkan potensi besar untuk meningkatkan relevansi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan akses pendidikan yang lebih adil, tantangan-tantangan tersebut memerlukan solusi kreatif dan kolaboratif antara berbagai pihak. Keterlibatan masyarakat lokal, dukungan pemerintah, serta perhatian terhadap keberagaman dan kebutuhan lokal menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

5. Model Pendidikan Berbasis Komunitas dan Kawasan

Pendidikan hendaknya dipandang sebagai “proses” yang tidak berdiri sendiri melainkan bersifat konstitutif; dibentuk oleh beragam aspek dan *discourse* di luarnya. Ekonomi, budaya, kawasan, hingga teknologi, merupakan sedikit dari banyaknya aspek yang berkontribusi penting pada pengembangan kualitas pendidikan. Berbasis pada pendekatan komunitas dan kawasan, riset ini memandang penting upaya mereformulasi kebijakan pengembangan Pendidikan terkhususnya di kawasan 3T. Seperti halnya uraian penjelasan informan sebelumnya yang mempertegas premis tentang keteringgalan kualitas pendidikan yang diakibatkan karena minimnya ketersediaan infrastruktur penopang, maka kerangka atau model alternatif tata kelola sistem pendidikan perlu dirumuskan. Model alternatif tersebut hanya dapat dikerangkai melalui identifikasi terhadap masalah mendasar yang dialami oleh komunitas di kawasan 3T.

Melalui hasil riset, ditemukan setidaknya dua masalah mendasar dalam upaya pengembangan pendidikan yakni ketersediaan tenaga pendidik dan aksesibilitas dan fasilitas. Kedua masalah tersebut memberi dampak nyata pada kualitas peserta didik diakibatkan praktik transfer pengetahuan yang berjalan tidak maksimal. Kedua masalah mendasar itu dipengaruhi oleh sejumlah aspek, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan berbasis komunitas dan kawasan perlu diformulasikan sebagai upaya alternatif mengatasi kesenjangan tersebut. Pendekatan berbasis komunitas dihadirkan guna memberi rekognisi tentang pentingnya pelibatan komunitas warga dengan mengacu pada kapasitas sistem dan jejaring sosial. Sementara *discourse* tentang kawasan diformulasi guna mempertegas pentingnya kepekaan tentang kerentanan kewilayahan yang dialami oleh komunitas warga, sebagaimana digambarkan berikut ini:

Tabel 9: Pemetaan Potensi Jejaring Komunitas



Tabel di atas hendak menjelaskan tentang jejaring sosial yang ada di dalam komunitas warga. Formasi aktor dan lembaga-lembaga sosial sejauh ini dilihat berperan penting sebagai *Safety Valve* (katup pengaman) dalam mengatasi berbagai kerumitan yang inheren dalam realitas sosial kemasyarakatan. Meski begitu, terdapat fungsi strategis yang dapat dioptimalkan dalam kerangka menopang sistem pendidikan di dalam komunitas. Masing-masing aktor seperti tokoh adat hingga kepala sekolah, merepresentasikan jenis lembaga dengan fungsi dan peran yang berbeda. Meskipun berbeda, namun masing-masing darinya terkoneksi dengan katup-katup kewargaan yang memungkinkan adanya mobilisasi sumber daya komunitas dalam praktik kependidikan. Sampai di sini, diperlukan upaya untuk menyaring formasi aktor dan lembaga guna menemukan jejaring strategis yang dapat berkontribusi secara maksimal. Hal ini dilakukan tentunya dengan mempertimbangkan adanya dilema antara status, peran, fungsi dan legitimasi.

Merujuk pada Soekanto (2002) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan

sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang sesuai kedudukannya. Persis di situ, fungsi terhadirkan sebagai implementasi konkrit dari status dan peran. Meski begitu, status, peran dan fungsi, tidak selamanya korelatif dengan legitimasi. Hal ini disebabkan legitimasi yang sepenuhnya berkaitan dengan rekognisi (pengakuan). Paling tidak, terdapat beberapa bentuk legitimasi di antaranya yakni; Legitimasi Tradisional: masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin pemerintahan tersebut merupakan keturunan darah biru yang dipercaya harus memimpin masyarakat, Legitimasi Kualitas Pribadi: masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin pemerintahan tersebut dianggap memiliki kualitas pribadi berupa karisma maupun prestasi yang cemerlang, Legitimasi Prosedural: masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin pemerintahan tersebut mendapatkan kewenangan menurut prosedur sesuai peraturan perundang-undangan (Surbakti; 2010).

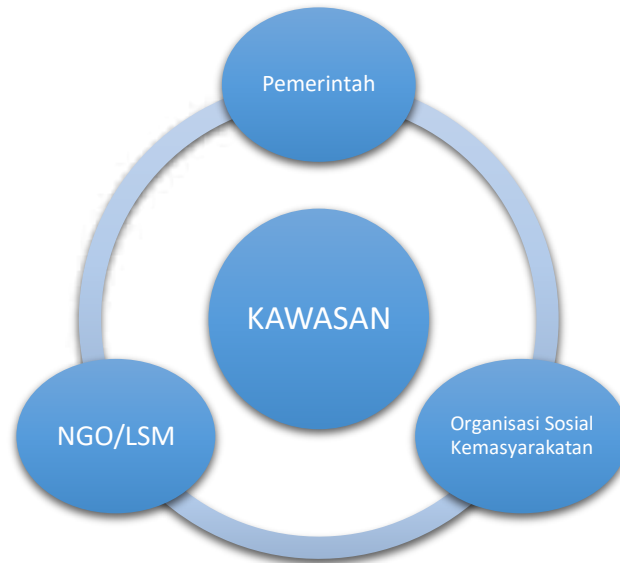
Problem legitimasi menjadi dasar dalam upaya untuk menyaring potensi yang inheren dalam formasi aktor dan kelembagaan sosial guna menemukan bentuk jejaring strategis. Dalam konteks masyarakat Abio dan Huku Kecil, terdapat kesamaan dalam mengidentifikasi jejaring aktor strategis yang selalu menjadi rujukan dalam masyarakat yakni tokoh agama dan kepala desa. Dua aktor tersebut sekaligus menjustifikasi dua bentuk kelembagaan sosial kemasyarakatan yakni lembaga agama dan lembaga desa atau perangkat desa. Dua aktor dan lembaga tersebut terkategori sebagai aktor dominan yang memiliki legitimasi sosial dalam memobilisasi dan mengkonsolidasi kekuatan sosial berbasis kewargaan, terlebih lagi, mampu mengkonsolidasi ragam komponen kemasyarakatan dalam aksi-aksi bersama, sebagaimana aktor-aktor alternatif lainnya seperti pemuda, tokoh adat, hingga kepala sekolah. Kemampuan tersebut menjelaskan tentang kapasitas sistem sosial kewargaan yang dapat dioptimalkan sebagai komponen pendukung suksesi pengembangan sistem pendidikan yang terjangkau di kawasan Abio dan Huku Kecil.

Di lain sisi, Abio dan Huku Kecil terkategori sebagai kawasan terisolir dengan rentang kendali kewilayahan yang rumit. Sebagaimana di uraikan sebelumnya, secara

geografis, Kecamatan Elpaputih berjarak sekitar 135 Km dari ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat. Sementara Pusat pemerintahan Kecamatan berada di Desa Elpaputih yang berjarak 62 Km dari Desa Abio dan Huku Kecil. Kedua Desa ini terletak di kawasan pegunungan dengan kondisi keterisolasian yang cukup besar. Huku Kecil berpenduduk 2.107 jiwa, jumlah yang nyaris sama dengan Desa Abio. Rentang kendali perjalanan menuju ke dua Desa tersebut terbilang sangat rumit. Akses jalan raya hanya terbatas di Desa Sumeith. Sementara jarak tempuh dari Desa Sumeith ke Desa Huku Kecil yakni sejauh 32 km dan 40 km ke Desa Abio. Untuk mengakses kedua Desa tersebut, moda transportasi yang dapat digunakan yakni motor ojek dengan rata-rata harga sekali pergi sebesar Rp.350.000 dengan durasi perjalanan minimal 3 jam.

Sementara itu, warga di kedua desa tersebut terbiasa pulang-pergi dari Desa ke Kota dengan berjalan kaki, menempuh perjalanan minimal 12 jam perjalanan. Mempertimbangkan kondisi kawasan yang sangat rumit dan terisolir, dengan rentang kendali yang sulit dan tidak mudah dijangkau, maka pendekatan kawasan menjadi relevan dibicarakan sebagai upaya mempertegas pentingnya kepekaan tentang kerentanan kewilayahan dalam rumusan kebijakan, terkhususnya di sektor pendidikan. Sebagaimana temuan riset, keterisolasian menjadi penyebab utama terhambatnya progresifitas dan transformasi pendidikan di kawasan ini. Ketidacukupan infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga tenaga pendidik, menjadi masalah serius yang diakibatkan dari minimnya aksesibilitas dan intervensi kebijakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kawasan mesti menghadirkan sebagai *mindset* pembangunan yang berdampak nyata pada sistem pendidikan. Sebagaimana pemetaan potensi jaringan komunitas, kawasan yang menghadirkan sebagai *mindset* kebijakan juga hendaknya terpetakan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

Tabel 10: Pemetaan Potensi *Stakeholders*

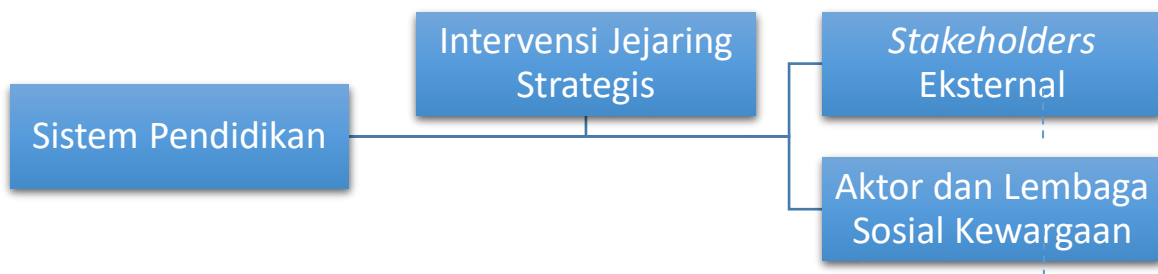


Fakta riset menunjukkan bahwa kawasan tampaknya telah menjadi *mindset* dalam upaya *stakeholders* memperkuat sistem pendidikan. Adapun *stakeholders* yang teridentifikasi yakni Pemerintah, NGO/LSM, dan Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya seperti GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) dan GEMAFURU (Gerakan Mahasiswa Alifuru). Masing-masing darinya telah melakukan sejumlah intervensi, yang secara taktis dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan sistem pendidikan di Abio dan Huku Kecil. LSM/NGO seperti Yayasan Tiga Batang Air membantu dalam membangun asrama di kawasan Kecamatan untuk menampung siswa-siswi dari kedua Desa tersebut yang hendak bersekolah di kawasan Kecamatan. Di lain sisi, Yayasan Tangan Pengharapan membantu menopang sistem pendidikan di Abio dan Huku Kecil dengan mendistribusikan tenaga pendidik, dan Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) membangun fasilitas sekolah dasar di Abio dan Huku Kecil. Sementara itu, pemerintah membantu dengan membuka lembaga Sekolah Negeri tingkat SMP di kawasan Huku Kecil. Terdapat juga Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang rutin melakukan ragam kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti pendonasian buku dan kegiatan pembelajaran yang ditujukan kepada para siswa di kedua Desa tersebut.

Meski begitu, sebagaimana tampak dalam temuan riset, jejaring *stakeholders* tersebut masih melakukan intervensi pembangunan pendidikan secara terpisah dan tidak terkonsolidasi. Dengan kata lain, meski terminologi kawasan telah menjadi *mindset* pembangunan pendidikan lintas sektor, namun belum ditemukan harmonisasi program yang terintegrasi. Situasi ini tampak akan berdampak nyata, mengingat masalah ketahanan sistem pendidikan di Desa Abio dan Huku Kecil tidak hanya menyangkut pola transfer pengetahuan, melainkan juga sustainibilitas sistem pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat Desa.

Merujuk pada pemetaan bentuk jejaring strategis di atas, maka diperlukan pola atau model pengembangan sistem pendidikan yang adaptif terhadap potensi lokal komunitas dan rentang kendali kewilayahan, sebagaimana diuraikan berikut ini;

Tabel 12: Model Sistem Pendidikan Terpadu



Tabel di atas menjelaskan tentang model pengintegrasian ragam komponen penting dan strategis yang dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem pendidikan di kawasan Abio dan Huku Kecil. Intervensi jejaring strategis diformulasikan sebagai rangkaian kesatuan aksi yang saling terhubung. Hal ini tentunya berdampak pada banyak program pengembangan sistem pendidikan, terkhususnya di kawasan 3T, sebagaimana Abio dan Huku Kecil. Masing-masing jejaring strategis diasumsikan memiliki kelengkapan *networking* dan sumber daya. *Stakeholders* eksternal seperti pemerintah dan NGO dilengkapi dengan sumber daya materil seperti kapasitas finansial, regulasi, dan sumber daya manusia. Sementara itu aktor dan lembaga sosial kewargaan memiliki

kapasitas dalam memobilisasi sumber daya lokal, terkhususnya masyarakat. Dua jenis status, fungsi, peran dan legitimasi yang berbeda tersebut, hendaknya terkonsolidasi dan terintegrasi dengan menjadikan komunitas warga sebagai *support system* yang produktif bagi lembaga pendidikan.

Dapat diformulasikan secara teknis, *stakeholders* eksternal (NGO dan Pemerintah) bertanggung jawab atas penyiapan regulasi pendidikan yang akomodatif dan adaptif dengan kondisi kewilayahan, mempersiapkan format pelatihan, pembimbingan dan pengajaran yang dikhususkan pada kawasan tersebut, serta dukungan finansial. Berbeda dengan itu, aktor dan lembaga sosial kewargaan bertanggung jawab untuk memobilisasi, mengidentifikasi, dan menjaring ragam sumber daya lokal yang produktif terhadap pengembangan sistem pendidikan kawasan. Yang diformulasikan oleh *stakeholders* eksternal mesti bersumber sepenuhnya dari kerja aktor dan lembaga sosial kewargaan. Hal ini dilakukan guna memastikan program pengembangan pendidikan di kawasan tersebut berlangsung dengan tepat sasaran.

Hal ini setidaknya berbeda dengan model intervensi dari jejaring strategis yang selama ini dipraktikkan dalam menanggulangi kesenjangan pendidikan di kawasan 3T, sebagaimana yang ditampilkan melalui program Indonesia Mengajar, yang lebih memilih mendistribusikan sumber daya manusia terampil yang berasal dari luar kawasan terisolir, guna melakukan transfer pengetahuan ketimbang melakukan pengayaan dan pengembangan sumber daya manusia lokal untuk menjadi subjek atau tenaga pendidik. Situasi ini diuraikan sebagai respon atas banyaknya inisiatif warga lokal yang hendak mengabdikan, namun terkendala dengan urusan yang cenderung bersifat administratif. Intervensi jejaring strategis yang terkonsolidasi dan terpadu memungkinkan pengembangan sistem pendidikan yang akomodatif dan adaptif dengan meletakkan sustainabilitas sistem pendidikan sebagai orientasi utama.

Menyangkut aspek sustainabilitas, warga Abio dan Huku Kecil menampilkan pola yang cukup unik guna memastikan keberlanjutan studi siswa-siswi dari kedua Desa tersebut. Fakta bahwa pada kawasan tersebut, hanya terdapat sekolah jenjang SD dan

SMP, sementara ada kebutuhan untuk melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya. Pendekatan kekeluargaan menjadi modal penting yang sejauh ini dimanfaatkan secara produktif. Dikarenakan ketiadaan akses jalan dan ketidakmungkinan bagi para siswa untuk dapat secara *mobile* bepergian dari Desa ke Kecamatan dan Kota, maka para siswa memilih untuk menjadi “perantau” dan mendiami rumah milik keluarga dekat lainnya maupun kerabat. Hal ini dilakukan dengan orientasi utama yakni dapat melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya. Situasi ini setidaknya menjelaskan tentang aktivasi modal sosial yang fungsional terhadap kebutuhan nyata dari sistem pendidikan di kawasan Abio dan Huku Kecil. Model pertalian kewargaan digunakan secara optimal guna menopang kehandak untuk mengenyam pendidikan. Persis di sini, intervensi jejaring strategis yang terpadu dapat dimanfaatkan sebagai katup pengaman (*safety valve*), guna menstimulasi realitas pendidikan di kawasan terisolir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pentingnya membangun sistem pendidikan yang adaptif terhadap potensi lokal dan rentang kendali kewilayahan mencerminkan kebutuhan untuk merancang model yang tidak hanya terfokus pada penyediaan sumber daya pendidikan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan keterjangkauan pendidikan bagi masyarakat setempat. Mengembangkan model pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan di kawasan Abio dan Huku Kecil memerlukan sinergi antara berbagai pihak dan pemanfaatan potensi lokal yang ada. Meskipun tantangan masih ada dalam hal harmonisasi program antara stakeholders, dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan lokal, diharapkan ketahanan sistem pendidikan di kedua desa tersebut dapat diperkuat dan dapat bertahan dalam jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan pemetaan yang ada, yang dapat di tawarkan sekaligus saran untuk model pengembangan pendidikan yang ideal di kawasan Abio dan Huku Kecil harus mencakup beberapa komponen berikut:

1. Penguatan Koordinasi Antar Stakeholders. Meskipun telah ada berbagai inisiatif dari pemerintah, LSM/NGO, dan organisasi sosial kemasyarakatan, intervensi yang dilakukan masih terkesan terpisah. Untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkelanjutan dan efektif, perlu adanya platform koordinasi yang menghubungkan berbagai pihak ini. Hal ini akan memastikan bahwa program-program yang dijalankan saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Misalnya, program penguatan kapasitas tenaga pendidik yang dilakukan oleh Yayasan Tangan Pengharapan bisa lebih terintegrasi dengan pengembangan fasilitas oleh Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) atau infrastruktur yang dibangun oleh Yayasan Tiga Batang Air.

2. Pendekatan Berbasis Potensi Lokal: Model pendidikan yang dikembangkan harus mampu mengakomodasi potensi lokal yang ada di kedua desa tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan local baik itu dalam aspek budaya, ekonomi, maupun sumber daya alam dan memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Misalnya, pengembangan kurikulum berbasis potensi lokal seperti keterampilan kerajinan tangan, pertanian, atau pendidikan berbasis lingkungan yang relevan dengan kondisi setempat dapat memperkaya pengalaman belajar siswa.
3. Peningkatan Akses dan Keterjangkauan : Pendidikan di kawasan ini harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Meskipun Yayasan Tiga Batang Air sudah membantu membangun asrama bagi siswa yang berasal dari Desa Abio dan Huku Kecil, masih perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa biaya pendidikan, transportasi, dan kebutuhan lainnya tetap terjangkau. Salah satunya adalah dengan menggandeng pihak swasta, pemerintah daerah, dan komunitas untuk menyediakan subsidi atau bantuan kepada keluarga yang kurang mampu.
4. Sistem Pendidikan yang Fleksibel dan Inklusif : Mengingat tantangan geografis dan sosial yang ada di kawasan tersebut, sistem pendidikan harus bersifat fleksibel dan inklusif. Pendekatan pendidikan yang berbasis pada sistem sekolah negeri, yang telah dimulai dengan dibukanya Sekolah Negeri tingkat SMP di Huku Kecil, perlu dilengkapi dengan sistem pendidikan non-formal seperti pendidikan jarak jauh, kelas terintegrasi dengan komunitas, atau kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis pada pemahaman local.
5. Penguatan Kapasitas Guru dan Tenaga Pendidik : Kualitas pengajaran sangat bergantung pada kapasitas tenaga pendidik. Meskipun Yayasan Tangan Pengharapan sudah mendistribusikan tenaga pendidik ke desa-desa ini, peningkatan profesionalisme guru perlu diperkuat melalui pelatihan yang berkesinambungan dan berbasis pada kebutuhan lokal. Pendekatan pelatihan yang kolaboratif antara LSM, pemerintah, dan organisasi sosial kemasyarakatan dapat membantu memperkuat keterampilan dan wawasan tenaga pendidik.

6. Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan : Pengelolaan sumber daya yang terintegrasi akan mendukung keberlanjutan sistem pendidikan di kawasan Abio dan Huku Kecil. Hal ini mencakup manajemen dana pendidikan yang transparan dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan, serta pengelolaan fasilitas yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Kolaborasi antara pemerintah daerah, NGO/LSM, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang efisien dan berkelanjutan.
7. Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Pendidikan : Pengembangan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau pemerintah, tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan masyarakat sekitar untuk turut berperan dalam mendukung pendidikan. Melalui program-program partisipatif, seperti keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah atau pembentukan kelompok belajar di tingkat desa, akan meningkatkan rasa memiliki terhadap pendidikan dan memastikan pendidikan dapat bertahan di komunitas tersebut.
8. Pemantauan dan Evaluasi Terpadu : Agar model pendidikan ini dapat berjalan efektif, diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang dapat menilai pencapaian dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Evaluasi berbasis data yang melibatkan semua *stakeholders* baik pemerintah, LSM, maupun masyarakat akan memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan sistem pendidikan dan memungkinkan adanya penyesuaian yang lebih cepat dan tepat.

Daftar Pustaka :

- Archie, M. 2008. *Theories of Cultural Centeredness: Multiculturalism and Realities* (online). (<http://www.carleton.ca>)
- Andi Nur fadillah, Suljumansah dan Mahmud. 2021. *Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Terpencil (Studi Kasus pada SD Inpres Ampiri Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru)*. *YUME : Journal of Management*. Volume 4 Issue 3 (2021) Pages 547 – 555
- Amaluddin Rukmuin, Wilda Payapo, Abdul Aziz Laitupa. 2017. *Pengukuran Kinerja Pembangunan Manusia Desa/Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Menggunakan Analisis Multivaria*. *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi* Vol. XI, No.2, Desember 2017. ISSN 1978-3612
- Callois, J.M & V. Angeon. 2004. *On the Role of Social Capital on Local Economic Development; An Econometric Investigation on Rural Employment Areas in France*. AES Conference 2004
- Commission Research paper. 2003. *Social Capital; Reviewing the Concept and its Policy Implications, Commonwealth of Australia*. Productivity Commission; Melbourne
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). New York, NY: McGraw Hill.
- Foxton, F. and R. Jones. 2011. *Social Capital Indicators Review*. London: Office of National Statistics
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ruslani, Penerbit Qalam.
- Greif, Avner. 1994. *Cultural Beliefs and the Organization of Society; A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies*. *The Journal of Political Economy*, Volume 102 issue 5; 912-950
- Hechter, M., & Opp, K. (2001). *Social Norms*. New York: Russell Sage Foundation.

- Imam Fitri Rahmadi. 2020. *Pendidikan di Daerah Kepulauan Terpencil: Potret Siswa, Guru, dan Sumber Belajar*. JPE (Jurnal Pendidikan Edutama) Vol. 7 No. 1 Januari 2020, P-ISSN: 2339-2258 (Print) E-ISSN: 2548-821X (Online)
- Keck, Markus and Patrick Sakdapolrak, 2013. *What is social resilience? Lessons learned and ways forward*. Erdkunde, Vol. 67, No. 1
- Lang, Robert T., and Steven P. Hornburg. 1998. *What is Social Capital and Why Is it important to Public Policy*. Housing Policy Debate, Volume 9, Issue 1, Fannie Mae Foundation. (PDF) Modal Sosial dalam Pembangunan. Available from: https://www.researchgate.net/publication/320431406_Modal_Sosial_dalam_Pembangunan
- Lin, N, Karen Cook, & Ronald S. Burt. 2001. *Social Capital- Theory and Research*. New York; Aldine De Gruyter
- Mohamad Abduh, Andika Angga Basiru, Melly Wulandari Narayana, Nurlaila Safitri, Rohman Fauzi. 2022. *Potret Pendidikan di Daerah Terpencil Kampung Manceri Cigudeg Kabupaten Bogor*. Jurnal Citizenship Virtues, 2022, 2(1), 291-300
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2007. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta : UI Press.
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurchamid, S. 2021. *Sekolah kampoeng: implementasi proses pendidikan kreatif berbasis desa*. Pekalongan; NEM
- Pradipto, Dedy. 2007. *Belajar Sejati VS Kurikulum Nasional*. Yogyakarta; Ikapi Kanisius.
- Putnam, R.D. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. The American Prospect
- Tilaar, A. R. 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Usman, Samad. (2014). *Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah*. Jurnal Ilmiah Didaktika Volume 15

Website

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/detil-program/>

<https://indonesiamengajar.org/> <https://v0.sbbkab.go.id/kecamatan-elpaputih/>

Rujukan Peraturan Prundangan dan Dokumen Kebijakan

Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diterbitkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024

Lampiran 1 : Dokumen Surat

1. Surat Rekomendasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Dolog Halang Atas, Tlp. 08114711157
<http://www.laknambon.ac.id> Email : info@laknambon.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: B-4237/lak.03/L.2/TL.00/08/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd
NIP : 197101231998032002
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Pangkat/Gol. : Pembina IV/a

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : 1. Dr. Alee Albartin Sapulette, S.Th., M.Si
2. Benico Ritiauw, S.Sos., MA


Untuk melakukan penelitian dosen pengembangan kolaborasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai 2 September 2024 di Desa Huku Kecil dan Desa Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 15 Agustus 2024
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat

Dr. Herly J. Lesilolo

2. Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Ins. J. F. Pattileihala

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 000.9.2 / 509

DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 tahun 2018 Tentang Penetapan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : SD 6/2/12 Tanggal 05 Juli 1972 Tentang Riset dan Survey di waktukan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

MEMBACA : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Kristen Negeri Ambon Nomor : B-4235/ak.03/L.2/TL.00/08/2024 Tanggal: 15 Agustus 2024
Perihal : Mohon Izin Penelitian

PERTIMBANGAN : Bahwa dengan dasar tersebut kami tidak keberatan untuk memberikan izin Kepada :

a. Nama : Dr. Alice Albarlin Sapulette, M.Si (Ketua)
b. Identitas : Dosen IAKN Ambon
c. NIP : 197503242005012003
d. Nama : BENICO RITIAUW, S.Sos., MA (Anggota)
e. Identitas : Dosen IAKN Ambon
f. NIP : 199406272024211001
g. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka Tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan judul :
"PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN BERBASIS KOMUNITAS DAN KAWASAN (STUDI KESEJANGKAPAN PADA KAWASAN TERPENCIL DESA HUKU KECIL DAN DESA ABLO, KECAMATAN ELPAPUTH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT)"
2. Lokasi Penelitian : Desa Huku Kecil dan Desa Ablo Kecamatan Elpaputh Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Waktu Lama Penelitian : 20 Agustus 2024 s.d 20 Oktober 2024.
4. Anggota :
5. Bidang Penelitian : Pendidikan Agama Kristen
6. Status Penelitian : Baru.


Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan
- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku
- Surat izin ini hanya berlaku untuk kegiatan Penelitian
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat
- Menyampaikan 1(satu) Eks. Hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Seram Bagian Barat
- Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 Serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut

Demikian surat izin ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PIRU
PADA TANGGAL : 20 Agustus 2024

**a.n. PTL KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
SEKRETARIS**


TAGRANI PELLU, SE
Pembina
NIP. 196903022006041017

TEMBUSAN : Diampikan Kepada Yth

- Bupati Seram Bagian Barat di Piru (petunjuk laporan);
- Ketua LPPM IAKN Ambon Di Ambon;
- Kepala Kantor Kecamatan Elpaputh di Elpaputh;
- Kepala Desa Huku Kecil di Huku Kecil;
- Kepala Desa Ablo di Ablo;
- Sdr. Dr. Alice Albarlin Sapulette, M.Si di Tempat;
- Asip.

Lampiran 2 : Dokumentasi

1. Akses Jalan



2. Proses dengan Informan



3. Keadaan Sekolah



4. Asrama Tiga Batang Air (Saka Hote)





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian riset Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) sebagai salah satu wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan pengembangan, maka dipandang perlu memberikan bantuan penelitian;
 - b. bahwa berdasarkan kepentingan strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan hasil penilaian tim penelaah terhadap proposal bantuan penelitian, dipandang perlu menetapkan nama-nama penerima bantuan penelitian dosen PTKK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Penelitian Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan



Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung Jawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Noor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 78);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Penerima Bantuan Penelitian Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang berhak menerima bantuan penelitian dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Penelitian Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen berhak menerima bantuan penelitian dosen dimaksud dengan ketentuan/mekanisme sebagaimana diatur dalam Pedoman Bantuan Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA
BANTUAN PENELITIAN DOSEN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
KRISTEN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TAHUN 2024

I. Skema Bantuan Penelitian Pembinaan Kapasitas/Penelitian Pengembangan Kapasitas

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1	Dr. Roimanson Panjaitan, M.Pd.K, Helen Dorince Sonbai	Kemitraan Sekolah Dengan Lembaga Keagamaan Kristen Dalam Meningkatkan Penyediaan Layanan Pendidikan Inklusif di Kota Kupang
2	Erwin Sianturi, Febriyando, Siguti A. Sianipar, Chrizty M.T Lenzun	Implementasi Metode Montessori dalam Pembelajaran Musik Anak Usia Dini di IAIN Manado
3	Lodia Amelia Banik, Sonia M. Nubatonis, Margaretha Hege Udju	Implikasi Bahasa dalam Pendidikan Agama Kristen untuk mendorong sikap moderat siswa di SMA Kristen Amanuban Selatan
4	Dr. Desire Karo Karo, M.Pd., Dr. Innawati, Dr. Urbanus Sukri	Evaluasi Kolaborasi Pluralisme dan Moderasi Beragama di Indonesia untuk Mengembangkan Identitas Kebangsaan Inklusif: Masjid, Gereja Protestan, Gereja Katolik, Klenteng, Pura, dan Vihara di Royal Residence Surabaya
5	Dr. Tony Salurante, M.A	Konsep <i>Prophetic Pragmatism Willy Jenkins</i> : Membangun Ekologi Spiritual untuk Kehidupan Berkelanjutan Menggereja di Indonesia

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 NOMOR 268 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA
 BANTUAN PENELITIAN DOSEN
 PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
 KRISTEN DIREKTORAT JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 TAHUN 2024

II. Skema Bantuan Penelitian Dasar/Penelitian Dasar Interdisipliner

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1	Febby Nancy Patty, D.Th.,M.Th , Dr. S.B Warella , M.Pd.k , Dr. Weldemina Yudit Tiwery, M.Hum	Membaca Text Matius 2:16-23 Dengan Menggunakan Perspektif Galtung dan Implikasinya Bagi Nilai-Nilai Perdamaian
2	Dr. Yamowa'a Bate'e, M.Th, Merilyn, Desi Natalia	Kajian Teologi Ekofeminis terhadap Tradisi Mandare Uwei dan Spiritualitas Interreligius Perempuan Dayak di Kabupaten Pulang Pisau
3	Denni H. R. Pinontoan, Relly Agnes Poluan	Kajian Terhadap Kosmologi Minahasa dalam Upaya Rekonstruksi Teologi Ekologi Berdasarkan Pengetahuan Lokal
4	Royke Lantupa Kumowal, M.Th., Heliyanti Kalintabu, M.Pd.K	Moderasi Beragama sebagai Jalan Menuju Toleransi (Studi Kasus Kontestasi Pendirian Rumah Ibadah Di Desa Tumaluntung, Sulawesi Utara)
5	Dr. Isak Suria, Dr. Henoch Willanto, Dr. Yamin Luciana, M.Pd.K	Deo Volente: Menggali Konsep 'Kehendak Ilahi' dalam Agama-Agama Mayoritas dan Dampaknya Terhadap Dialog Lintas Agama
6	Dr. Anatje Ivone Sherly Lumantow, M.Mis, M.Th, Ubat Pahal Charles Silalahi, M.Phil , Alfons Renaldo Tampenawas, M.Th	Ekoteologi dan Pembangunan Berkelanjutan: Mengintegrasikan Iman Kristen dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7	Dr. Iwan Setiawan Tarigan, M.Th, Dr. Maria Widiastuti, M.Pd.K	Implementasi Sangkep Nggeluh dalam Masyarakat Karo sebagai upaya Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia
8	Ebenhaizer Imanuel Nuban Timo, Mefibosed Radjah Pono, M.Si.Teol, Januari Naomi Duka	Iman Kristen dan Pengembangan Masyarakat (Studi tentang Persepsi Persekutuan Doa di Kota Kupang Tentang Dunia dan Dampaknya Bagi Partisipasi Kristen Dalam Pengembangan Masyarakat)



No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
9	Deflita Rusly Lumi, Sugijanti Supit	Analisa Bentuk Kekerasan dalam Praktek Budaya Mapalus dan Implikasinya Bagi Pendidikan Kristen pada Anak di Jemaat GMIM Sion Pontak
10	Muis Saifuddin Anshari Pikahulan, MH , Dr. Sudirman Simanihuruk, M.Th	Pengembangan Model Kemitraan Dosen LPTK dan Guru di Sekolah Menengah Teologi Kristen Indonesia

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA
BANTUAN PENELITIAN DOSEN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
KRISTEN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TAHUN 2024

III. Skema Bantuan Penelitian Kajian Aktual Strategis/ Penelitian (Terapan)
Pengembangan Pendidikan Tinggi

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1	Prof. Dr. Hendrik Bernadus Tetelepta, M.Pd , Dr. Fransiskus Irwan Widjaja, MAIE, M.Mis, Ph.D, Dr. Candra Gunawan Marisi, M.Th	Jalur Kuno Ofir terungkap sebagai Suvarnadvipa, Fakta dan Bukti Sumatera di Dunia Modern
2	Dr. Jefri Mailool, S.T., M.Pd, Ventje Adri Politon, S,Pd., M.Pd	<i>Measurement of Basic Soft Skills of Teacher Education Student in Christian Higher Education</i>
3	Dr. Sukamto , Panca Parulian S., M.Th.	Sejarah Peran Gereja dalam Pembangunan Ekonomi di Dusun Bongsorejo, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Dari Akhir Abad Ke-19 sampai Awal Abad Ke-20
4	Dr. SYANI BOMBONGAN RANTE SALU, M.Pd.K , Tri Oktavia Silaban, NOVITA TODING, Seprianus Siampa	Pengembangan Kompetensi Pedagogik Pendidikan Berdasarkan Semiotika Orang Toraja Bagi Pengembangan Karakter Mahasiswa IAKN Toraja
5	Prof. Dr. Christiana Demaja Wihelmina Sahertian, M.Pd. , Dr. Hendrik A.E. Lao, M.Pd., Dr. Onisimus Amtu, M.Pd., Yunardi Kristian Zega, M.Pd	Transformasi Sikap Beragama Melalui Pendidikan Agama Kristen : Studi Mixed Methods di SMA se-Kota Kupang
6	Alfonso Munthe, Mika Melliani, Restiani	Program Strategis Pencegahan Pernikahan Anak di Kalimantan Tengah: Rekomendasi Pemikiran Filsuf Feminis Iris Marion Youn
7	Dr. Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn, Dr. Sipora Blandina Warella, M.Pd.K, Yohanis Sefwin Noya	Studi Teologi Terhadap Persaudaraan di Negeri Hulalui (Kristen) dan Negeri Rohomoni (Islam) dalam Pengelolaan Keberagaman Masyarakat di Maluku Tengah



No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
8	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd., Brian Aston Gea, S. Th, M.Th., Idris Simbolon, S.Th. M.Pd	Kerjasama Penyelenggara Program Studi S1 Teologi IAKN Tarutung dengan para Pimpinan Gereja dalam Pembelajaran Dogma Gereja-Gereja Arus Utama di Sumatera Utara: Akselerasi Serapan Lapangan Kerja Lulusan S1 Teologi IAKN Tarutung
9	Subaeda Luma, M.Th, Nancy Aprilia Heydemans, Yohan Brek, Frieska Putrima Tadung	Pendidikan Agama Kristen Berbasis Pendampingan Pastoral Terhadap Korban Bencana Alam
10	Dr. Oktober Tua Aritonang, M.Pd.	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Metaverse untuk Menumbuhkan Sikap Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA
BANTUAN PENELITIAN DOSEN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
KRISTEN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TAHUN 2024

IV. Skema Bantuan Penelitian Terapan/Penelitian Terapan Kajian Strategi Nasional

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1	Prof. Sonny Eli Zaluchu, D.Min, D.Th, DSA , Dr. Priyantoro Widodo,M.Th , Dr. Agus Kriswanto, M.Th	Rekonstruksi Konseptual Moderasi Beragama Konteks Indonesia berbasis Penelitian Terdahulu: Bibliometric Analysis
2	Dr. Agusthina Siahaya, M.Th, Vera Talimbung, M.Pd , Priskila Damaris Lokollo, S.Si., M.Cs, Sarah Lilihata	Evaluasi Dampak Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Terhadap Kompetensi Guru PAK Berdasarkan Perdirjen Nomor 2626 Tahun 2023
3	Joni Tapingku, Yohanes Krismantyo Susanta	Membangun Teologi Solidaritas Dalam Bingkai Moderasi Beragama Di Tana Toraja (Proposal Terapan Kajian Strategis Nasional)
4	Dr. Olivia Cherly Wuwung, ST., M.Pd	Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Program Desa Moderasi Beragama Di Sulawesi Utara
5	Dr. Harun Y. Natonis,S.Pd,M.Si, Dr. Anita A. Hege Udju, M.Pd, Dr. Ibrahim N. Boiliu , Maya Djawa, Ph.D	Kontribusi Pendidikan Multikultural Dalam Pembentukan Karakter Siswa Pada Smtk Se-Kabupaten Timor Tengah Selatan
6	Wolter Weol, Charstar Arstilo Rumbay	Dari Labirinisasi Moderasi Beragama Menuju Egaliterianisasi Berwatak Pluralis-Partikularis : Sebuah Kajian Antropologis, Filosofis dan Historis Emik Minahasa
7	Dr. Rannu Sanderan, M.Th , Salmon Pamantung. Ph.D, Syukur Matasak, M.Th , Naomi Sampe, Ph.D.	<i>Blending Tradition and Faith : An Analysis of Freedom of Expression in the Interactions Between Christians and Muslims in North Toraja</i>
8	Dr. Harianto GP, D.Th., D.Ed. Dr. Ester Widiyaningtyas, Dr. Dorce Soondopen	Model Pengembangan Kualitas Unggul”: Studi Teologi, Manajemen, dan Teknologi Pendidikan Perguruan Tinggi Teologi Keagamaan Kristen di Indonesia
9	Prof. Binsar Jonathan Pakpahan Ph.D, Herman Sutiono M. Th	Studi Hubungan HKBP dan Negara di dalam perspektif Teologi Publik yang Berkelanjutan



No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
10	Farno Billy Arthur Gerung, M.Th - Christar Arstilo Rumbay	Perdagangan dan Konsumsi Daging Anjing: Tinjauan Agama dan Budaya di Minahasa
11	Dr. Setinawati, M.Th, Isabella Jeniva, M.Si, Kurniawan Netanyahu, M.A.	Pengembangan Pedoman Praktis Pengelolaan Konflik Sosial dalam Peningkatan Sinergi Pemimpin Agama dan Adat di Kabupaten Kapuas
12	Dr. Alce Albartin Sapulette, M.Si., Benico Ritiauw, S.Sos, M.A	Pengembangan Sistem Pendidikan Berbasis Komunitas dan Kawasan (Studi Kesenjangan pada Kawasan Terpencil Desa Huku Kecil dan Desa Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat)
13	Prof. Dr. Albiner Siagian, M.Si, Melinda Siahaan, Ph.D , Dian Purba, MA	Kekristenan dan Kosmopolitanisme Tarutung, 1920-an-1930-an
14	Dr.Togardo Parlindungan Siburian, Dr. Binsar A Hutabarat, M.Th, Dodi Kusmawanto MA, Tintin Kristiana, M.Pd	Peran Masyarakat Etis-Global pada Pembangunan Masyarakat Lokal: Membangun Kerukunan Melalui Kesadaran Kolektif Pengelolaan Sampah Bersama dari Institusi Berbasis Keagamaan Kristen STT IKSM Santosa Asih Kepada Masyarakat Perkotaan
15	Telhalia, M.Th., D.Th., Firmanians Romula Tuerah, M.Phil., Samuel Wailan Leonard Wanget, M.Th	Profil Moderasi Beragama Civitas Akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen
16	Dr.Susanto Dwiraharjo,M.Th.,D.Min.,DSA, Janfrido Maringantua Siahaan,M.Th., Amir Sormin,S.Th	Spiritual Digital Sebagai Model Komunikasi Virtual untuk Meningkatkan Potensi dan Memperbaiki Relasi Sosial Generasi Milenial
17	Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru, MA,. Dr. Agustina Ch. Kakiay, M.Si., Elviaty H. Tauran, S.Tr.Par., M.Arch., Marlin Ch. Laimheheriwa, M.Phil	Transformasi Sikap Moderat Masyarakat di Destinasi Wisata: Studi Kasus pada Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG

